



LAPORAN KINERJA TAHUNAN



Laporan Kinerja Tahun 2022

**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**Jl. Ahmad Yani Tlp. (0561) 736541 Fax. (0561) 730062 Kode Pos 78124
PONTIANAK**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas izin-Nya penyusunan Laporan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 selesai disusun sesuai ketentuan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahunan merupakan media akuntabilitas manajerial Kepala Perangkat Daerah (PD) kepada Gubernur mengenai capaian kinerja suatu instansi atas dasar rencana kinerja yang secara berkala setiap tahun disusun laporannya. Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menyajikan informasi yang diperlukan atas kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Semoga Laporan Kinerja Tahunan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pontianak, 31 Januari 2023


KEPALA BIRO ORGANISASI,
MEDYA YANUAR ABDULLAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700115 198903 1 001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	3
3. Tugas Pokok dan Fungsi	4
4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	8
5. Sumber Daya Keuangan	11
6. Sarana dan Prasarana	12
B. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
A. Perencanaan Strategis (Renstra) 2018-2023	25
1. Visi	25
2. Misi	25
3. Tujuan dan Sasaran Strategis	26
B. Perjanjian Kinerja (Perjankin) Tahun 2021	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Capaian Kinerja Organisasi	29
B. Realisasi Anggaran	57
BAB IV PENUTUP	60
LAMPIRAN:	
1. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2022.	

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Biro Organisasi merupakan salah satu unit kerja yang berada dibawah lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dimana berdasarkan Pasal 77 ayat (1) huruf a, Biro Organisasi mempunyai tugas merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah di bidang kelembagaan perangkat daerah dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja. Biro Organisasi terdiri dari :

- a. Kepala Biro;
- b. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- c. Bagian Tatalaksana;
- d. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari:

1) Kepala Biro

Dipimpin oleh seorang Kepala Biro (Pejabat Struktural Eselon II.b).

2) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Pejabat Struktural Eselon III.a) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro.

3) Bagian Tatalaksana

Dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tatalaksana (Pejabat Struktural Eselon III.a) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro. Bagian Tatalaksana membawahi :

- a. Sub Bagian Tata Usaha Biro; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

4) Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

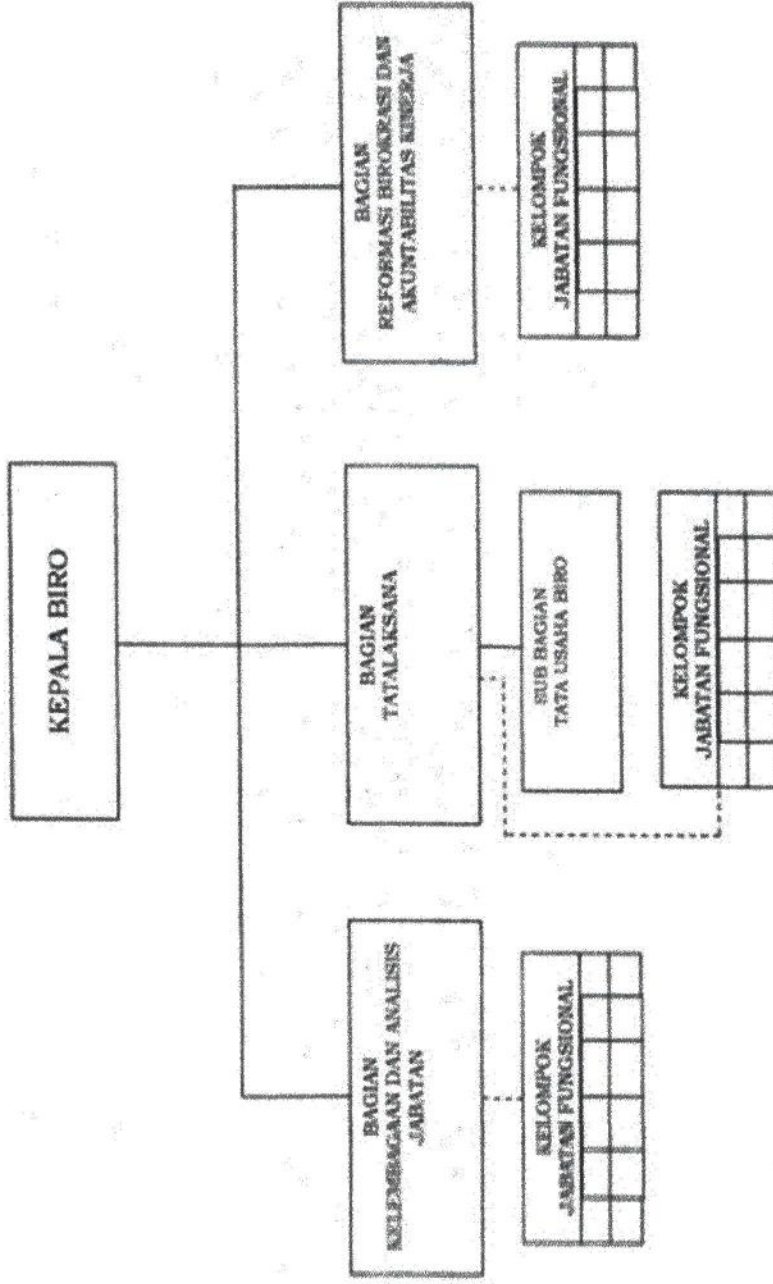
Dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja (Pejabat Struktural Eselon III.a) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro.

5) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh pejabat fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro.

Susunan Organisasi dapat dilihat pada gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar berikut:

GAMBAR 1.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT



3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Biro Organisasi mempunyai tugas merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah di bidang kelembagaan perangkat daerah dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja. Untuk melaksanakan tugas, Biro Organisasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan program kerja di bidang organisasi;
- b. perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan perangkat daerah dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang kelembagaan perangkat daerah dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang kelembagaan perangkat daerah, analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan organisasi perangkat daerah pada Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain di bidang organisasi yang diserahkan oleh

Gubernur, Sekretaris Daerah atau Asisten Administrasi dan Umum.

Sesuai dengan susunan organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar, maka tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1) Kepala Biro Organisasi

Kepala Biro mempunyai tugas memimpin, membina, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan serta mengkoordinasikan kebijakan perangkat daerah di bidang organisasi.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Biro mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan program kerja di bidang organisasi;
- b. perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan perangkat daerah, analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang kelembagaan perangkat daerah, analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan Kabupaten/Kota, analisis organisasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, evaluasi kelembagaan, fasilitasi dan verifikasi analisis jabatan, verifikasi analisis beban kerja, verifikasi standar kompetensi jabatan administrasi,

- verifikasi uraian jabatan, verifikasi peta jabatan, verifikasi evaluasi jabatan, serta pembinaan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang tatalaksana pemerintahan, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), tata naskah dinas, pakaian dinas, standarisasi sarana dan prasarana kerja, peta proses bisnis dan jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - f. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang pelayanan publik, penyusunan standar pelayanan internal dan pelayanan publik, fasilitasi forum komunikasi pendayagunaan aparatur negara, pengelolaan pengaduan pelayanan publik, fasilitasi inovasi pelayanan publik, monitoring standar pelayanan publik dan Survey Kepuasan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang reformasi birokrasi berdasarkan indikator 8 (delapan) area perubahan, pembinaan terhadap kelompok kerja 8 (delapan) area perubahan, serta fasilitasi dan verifikasi penilaian peningkatan kinerja 8 (delapan) area perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang akuntabilitas kinerja, monitoring peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang budaya kerja, pembinaan budaya kerja, monitoring dan fasilitasi penyelenggaraan budaya kerja, peningkatan nilai dan etika budaya kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. pengkoordinasian dan fasilitasi kebijakan perangkat daerah di bidang kelembagaan perangkat daerah, analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. pengendalian kegiatan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan organisasi perangkat daerah pada Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap tugas dan fungsi di bidang organisasi berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain di bidang organisasi yang diserahkan oleh Gubernur atau Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

2) Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan perangkat daerah provinsi, kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota, dan analisis jabatan,

serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi.

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan perangkat daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang analisis jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan dan analisis jabatan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. pengkoordinasian dan fasilitasi dengan perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan dan analisis jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang kelembagaan, analisis organisasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis, Cabang Dinas, serta lembaga non struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan di bidang kelembagaan, analisis organisasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten/Kota, serta fasilitasi Sekretariat Komisariat Wilayah Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang fasilitasi dan verifikasi analisis jabatan, verifikasi analisis beban kerja, verifikasi standar kompetensi jabatan administrasi, verifikasi uraian jabatan, verifikasi peta jabatan, verifikasi evaluasi jabatan, serta pembinaan Kabupaten/Kota di bidang analisis jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pembinaan dan pengawasan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan pada Kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan dan analisis jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan dan analisis jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kelembagaan dan analisis jabatan yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

3) Kepala Bagian Tatalaksana

Bagian Tatalaksana, mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah dan bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan serta administrasi di bidang tatalaksana pemerintahan, pelayanan publik dan tata usaha Biro.

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Tatalaksana mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja Bagian Tatalaksana;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang tatalaksana pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan kegiatan urusan dan pelayanan ketatausahaan Biro;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tatalaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengkoordinasian dan fasilitasi dengan perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tatalaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang tatalaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang tatalaksana pemerintahan, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), tata naskah dinas, pakaian dinas, standarisasi sarana dan prasarana kerja, peta proses bisnis dan jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang pelayanan publik, penyusunan standar pelayanan internal dan pelayanan publik, fasilitasi forum komunikasi pendayagunaan aparatur negara, pengelolaan pengaduan pelayanan publik, fasilitasi inovasi pelayanan publik, monitoring standar pelayanan publik dan Survey Kepuasan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pembinaan dan pengawasan di bidang ketatalaksanaan pada Kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang tatalaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tatalaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain di bidang ketatalaksanaan yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Tatalaksana membawahi 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Sub Bagian Tata Usaha Biro; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Tata Usaha Biro dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tatalaksana.

Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melaksanakan urusan dan pelayanan ketatausahaan Biro serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha Biro;
- b. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kegiatan Biro;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsional maupun pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha Biro;
- d. pelayanan administrasi kepegawaian, pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan

- sistem akuntansi dan pelaporan, pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- e. pelaksanaan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
 - f. pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIP, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro, pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro, perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
 - g. penyusunan rencana kerja reformasi birokrasi, perjankin, proses bisnis, SOP, cascading, analisi jabatan, analisis beban kerja (ABK), standar kompetensi jabatan (SKJ) administrasi, uraian jabatan, peta jabatan, evaluasi jabatan, pengelolaan standart pelayanan publik serta peningkatan nilai dan etika budaya kerja;
 - h. pelaksanaan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan Pegawai ASN di lingkungan biro;
 - i. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di tata usaha biro;
 - j. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian tata usaha biro;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha Biro; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain di bidang ketatausahaan yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, budaya kerja serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi.

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang reformasi birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang budaya kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian dan fasilitasi dengan perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; g. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja sesuai

- ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang reformasi birokrasi berdasarkan indikator 8 (delapan) area perubahan, pembinaan terhadap kelompok kerja 8 (delapan) area perubahan, serta fasilitasi dan verifikasi penilaian peningkatan kinerja 8 (delapan) area perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang akuntabilitas kinerja, monitoring peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang budaya kerja, pembinaan budaya kerja, monitoring dan fasilitasi penyelenggaraan budaya kerja, peningkatan nilai dan etika budaya kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. pembinaan dan pengawasan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja pada Kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain di bidang reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan saat ini didukung oleh 39 orang pegawai.

Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin jumlah Pegawai Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar sebagaimana terlihat pada **Tabel 1.1** sebagai berikut:

TABEL 1.1
JUMLAH PEGAWAI BIRO ORGANISASI
SETDA PROVINSI KALBAR BERDASARKAN
TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2022

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		TOTAL
		PRIA	WANITA	
1	2	3	4	5=(3+4)
1.	Pasca Sarjana	9	12	21
2.	Sarjana/D-IV	7	8	15
3.	Diploma III	0	0	0
4.	SLTA	1	2	3
J U M L A H		17	22	39

Sumber: Data DUK Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar Periode Desember 2022

Bila dilihat dari jenjang kepangkatan dan golongan sumber daya manusia pada Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat dapat terlihat pada **Tabel 1.2** sebagai berikut:

TABEL 1.2
JUMLAH PEGAWAI BIRO ORGANISASI
SETDA PROVINSI KALBAR BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN
DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2022

NO	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JENIS KELAMIN		TOTAL
		PRIA	WANITA	
1	2	3	4	5=(3+4)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	2	0	2
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	2	3	5
3.	Pembina (IV/a)	1	5	6
4.	Penata Tingkat I (III/d)	2	4	6
5.	Penata (III/c)	1	1	2
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	4	6	10
7.	Penata Muda (III/a)	5	3	8
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	0	0	0
	JUMLAH	17	22	39

Sumber: Data DUK Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar Periode Desember 2022

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas, dari jumlah 39 orang pegawai Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat, yang menduduki sebagai Jabatan Struktural sebanyak 5 pegawai terbagi atas: untuk eselon II.b sebanyak 1 orang, eselon III.a sebanyak 3 orang dan eselon IV.a sebanyak 1 orang.

Saat ini untuk formasi jabatan struktural telah terisi semua. Untuk lebih jelasnya susunan Pejabat Struktural dilingkungan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat tersebut dapat dilihat pada **Tabel 1.3** di bawah ini.

TABEL 1.3
PEGAWAI BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALBAR
BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL TAHUN 2022

NO.	JABATAN / NAMA	PENDIDIKAN	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN
1	2	3	4	5
A	ESELON II.b			
	1. Medya Yanuar Abdullah, S.Sos, M.Si	S-2	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Biro
B	ESELON III.a			
	1. Chasmia, S.IP, M.Si	S-2	Pembina Tk. I (IV/b)	Kabag Kelembagaan dan Analisis Jabatan
	2. Nelly Saleha Meilani, S.STP, M.Si	S-2	Pembina (IV/a)	Kabag Tatalaksana
	3. Guruh Paryono, S.I.P., M.Si	S-2	Pembina Tk. I (IV/b)	Kabag Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
C	ESELON IV.a			
	1. Kili Palyas Natalaga, S.STP., M.E	S-2	Penata (III/c)	Kasubbag Tata Usaha Biro

Sumber: Data DUK Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar Periode Desember 2022

TABEL 1.4
PEGAWAI BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALBAR
BERDASARKAN JABATAN FUNSIONAL TERTENTU
TAHUN 2022

NO	NAMA	PENDI DIKAN	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Wahyu Wibowo, S.Sos, M.Si	S-2	Pembina Tk. I (IV/c)	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Madya
2.	Dra. Chairunnisyah, M.Si	S-2	Pembina (IV/b)	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Madya
3.	Mohammad Hidjrin Agoes Armya, S.E, M.T	S-2	Pembina (IV/b)	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Madya
4.	Dina Meutia Sari, S.STP, M.Si	S-2	Pembina (IV/a)	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Madya
5.	Wida Febriana, S.Sos, M.Si	S-2	Pembina (IV/a)	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
6.	Kristin Novitasari, S.STP, M.Si	S-2	Pembina (IV/a)	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
7.	MarselinusFranata, S.STP	D-IV	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
8.	Siti Aisyah, S.Sos	S-1	Penata Tk.I (III/d)	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Bagian Tatalaksana
9.	Sri Umiyati, S.STP, M.P.A	S-2	Pembina (IV/a)	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
10.	Glen Septian ADS, S.STP, M.A.P	S-2	Pembina (IV/a)	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
11.	Rani Maya Sari, S.STP, M.Si	S-2	Pembina (IV/a)	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
12.	Sukmawati, S.Sos, M.H	S-2	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Kepegawaian Muda Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
13.	Supriyani, S.Kom, M.M	S-2	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

14.	Florina Wiyunny, S.E	S-1	Penata Muda (III/a)	Arsiparis Pertama
15.	Fahmi, S.E	S-1	Penata Muda (III/a)	Arsiparis Pertama
16.	Anas Sholikhin, S.I.P	S-1	Penata Muda (III/a)	Analisis Kebijakan Pertama, Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
17.	Duan Yandono, S.Sos	S-1	Penata Muda (III/a)	Analisis Kebijakan Pertama Bagian Tatalaksana
18.	Antonius Anem, S.IP	S-1	Penata Muda (III/a)	Analisis Kepegawaian Pertama, Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Sumber: Data DUK Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar Periode Desember 2022

Posisi Jabatan Fungsional tertentu 18 orang PNS dan untuk Jabatan Fungsional Umum sebanyak 16 orang PNS.

5. Sumber Daya Keuangan

Salah satu sarana penunjang yang cukup penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah sumber dana atau besarnya anggaran, tanpa adanya dukungan tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi motivasi kerja dan kinerja para pegawai dalam melaksanakan tugas pokoknya di Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar.

Pada Tahun Anggaran 2022 Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan alokasi anggaran adalah sebesar **Rp.3.173.176.796,-** yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2022. Pada saat perubahan anggaran pada pertengahan tahun 2022, pagu anggaran Biro Organisasi berubah menjadi **Rp.2.911.172.956,-** yang ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022. Rincian belanja untuk anggaran tersebut tercermin melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) dengan rekapitulasi terlihat pada **Tabel 1.5** sebagai berikut :

TABEL 1.5
REKAPITULASI APBD PER JENIS BELANJA
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALBAR
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Jenis Belanja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
1.	Belanja Operasi			
	Belanja Barang dan Jasa	2.911.172.956,00	2.871.324.770,00	98,63
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.911.172.956,00	2.871.324.770,00	98,63
2.	Belanja Modal			
	Belanja Modal Peralatan dan	0	0	0

No.	Jenis Belanja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Mesin			
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	JUMLAH BELANJA MODAL	0	0	0
	JUMLAH SELURUHNYA	2.911.172.956,00	2.871.324.770,00	98,63

Sumber: Data Keuangan Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar Tahun 2022

Dari jumlah anggaran tersebut di atas, dialokasikan untuk alokasi Belanja Operasi sebesar Rp.2.911.172.956,00, dan Belanja Modal sebesar Rp.0. Sehingga total alokasi belanja daerah sebesar Rp.2.911.172.956,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.871.324.770,00 atau sebesar 98,63%.

6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan dan dimiliki Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

a. Gedung Kantor

Gedung Kantor Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat saat ini menempati salah Gedung di Komplek Kantor Gubernur Kalbar pada Lantai 2 yang terletak di Jl. A. Yani Pontianak.

b. Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor yang ada pada Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok, dapat dilihat pada **Tabel 1.6**, di bawah ini:

TABEL 1.6
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
PADA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALBAR
TAHUN 2022

No	Nama Barang	Merk / Type	Harga Perolehan	Asal Perolehan
1	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA CT 382B –	2,502,392.00	APBD
2	Lap Top		8,029,353.00	APBD
3	Meja Biro		695,000.00	APBD
4	Uninterruptible Power Supply (UPS)		1,462,820.00	APBD
5	Papan Visual/Papan Nama	Buatan lokal	1,900,000.00	APBD
6	Meja Biro		6,949,800.00	APBD
7	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L6170	4,974,634.00	APBD
8	Uninterruptible Power Supply (UPS)		1,462,820.00	APBD
9	Uninterruptible Power Supply (UPS)		1,656,194.00	APBD
10	Thermo Gun	Thermo Gun WK-168	753,732.00	APBD

No	Nama Barang	Merk / Type	Harga Perolehan	Asal Perolehan
11	Lemari Besi/Metal		1,650,000.00	APBD
12	Lap Top	Merk Dell XPS Type 139310i5- 113507	15,074,649.00	APBD
13	Kursi Biasa		979,494.00	APBD
14	P.C. Unit		6,979,027.00	APBD
15	Lap Top		8,020,996.00	APBD
16	LCD Projector/Infocus		8,000,000.00	APBD
17	Uninterruptible Power Supply (UPS)		1,500,000.00	APBD
18	Uninterruptible Power Supply (UPS)		1,492,678.00	APBD
19	Meja Biro		3,049,200.00	APBD
20	Meja Kerja Pejabat Eselon II		850,000.00	APBD
21	Printer		949,655.00	APBD
22	Exhaust Fan		1,800,000.00	APBD
23	Lap Top	Merk Dell XPS Type 139310i5- 113507	15,074,649.00	APBD
24	Kursi Putar		528,000.00	APBD
25	Wireless		700,000.00	APBD
26	P.C. Unit		16,266,666.00	APBD
27	Printer		5,027,308.00	APBD
28	Sound System		4,800,000.00	APBD
29	Meja Biro		2,450,000.00	APBD
30	Meja Kerja Pejabat Eselon III		650,000.00	APBD
31	Lap Top	ASUS A56KA- FHD422	5,063,745.00	APBD
32	Mesin Penghitung Uang		5,027,308.00	APBD
33	Meja Kerja Pegawai Non Struktural		601,000.00	APBD
34	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L6170	4,974,634.00	APBD
35	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L3110	2,964,681.00	APBD
36	Printer (Peralatan Personal Komputer)	BROTHER T820DW	6,120,904.00	APBD
37	Lap Top		8,029,353.00	APBD
38	Alat Penghancur Kertas		2,671,993.00	APBD
39	Meja Biro		1,622,500.00	APBD
40	Sound System		4,800,000.00	APBD
41	P.C. Unit		6,979,027.00	APBD
42	Papan Visual/Papan Nama	Buatan Lokal	1,900,000.00	APBD
43	Filling Besi/Metal		1,752,000.00	APBD
44	Meja Kerja Pejabat Eselon IV		675,000.00	APBD
45	Meja Rapat		2,105,831.00	APBD
46	Kursi Rapat		651,805.00	APBD
47	Note Book/NetBook		8,818,150.00	APBD

No	Nama Barang	Merk / Type	Harga Perolehan	Asal Perolehan
48	Kursi Tamu		8,846,916.00	APBD
49	Filling Besi/Metal		2,702,500.00	APBD
50	Printer		949,655.00	APBD
51	Lap Top	Merk Asus ExpertBook Type P1440FA	8,039,812.00	APBD
52	Meja Kerja Pejabat Eselon III		650,000.00	APBD
53	Uninterruptible Power Supply (UPS)		5,700,000.00	APBD
54	Lap Top	ASUS ZEBBOOK PRO DUO TOUCH UX482EAR-EV0551	22,779,707.00	APBD
55	Papan Visual/Papan Nama	Buatan lokal	800,000.00	APBD
56	Lap Top	ASUS A56KA-FHD422	5,063,745.00	APBD
57	A.C. Split		10,570,920.00	APBD
58	P.C. Unit		5,639,500.00	APBD
59	Uninterruptible Power Supply (UPS)		5,700,000.00	APBD
60	Meja Panjang		500,000.00	APBD
61	AC Split		7,475,221.00	APBD
62	Lap Top		8,020,996.00	APBD
63	Uninterruptible Power Supply (UPS)		1,006,000.00	APBD
64	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L3110	2,964,681.00	APBD
65	AC Unit		6,644,160.00	APBD
66	Proyektor Romad Complet		8,426,869.00	APBD
67	Hard Disk		825,000.00	APBD
68	Meja Biro		2,450,000.00	APBD
69	Lap Top		8,029,353.00	APBD
70	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)		3,768,475.00	APBD
71	Meja Panjang		500,000.00	APBD
72	Kursi Tamu		8,500,000.00	APBD
73	Kursi Rapat		651,805.00	APBD
74	Papan Visual/Papan Nama	Buatan lokal	600,000.00	APBD
75	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)		3,768,475.00	APBD
76	Lemari Es		2,453,000.00	APBD
77	Meja Biro		2,467,500.00	APBD
78	LCD Projector/Infocus		892,472.00	APBD
79	Papan Visual/Papan Nama	Buatan Lokal	1,900,000.00	APBD
80	Meja 1/2 Biro		2,496,338.00	APBD
81	P.C. Unit		8,501,794.00	APBD
82	Uninterruptible Power Supply (UPS)		1,408,074.00	APBD

No	Nama Barang	Merk / Type	Harga Perolehan	Asal
----	-------------	-------------	-----------------	------

No	Nama Barang	Merk / Type	Harga Perolehan	Asal Perolehan
116	Kursi Kerja Pejabat Eselon II		1,186,500.00	APBD
117	Kursi Kerja Pejabat Eselon II		1,186,500.00	APBD
118	LCD Projector/Infocus		4,612,773.00	APBD
119	Note Book/NetBook		8,818,150.00	APBD
120	P.C Unit	P.C AIO ACER TYPE C22-1650	9,519,024.00	APBD
121	Printer (Peralatan Personal Komputer)		2,319,029.00	APBD
122	Lemari Besi/Metal		1,650,000.00	APBD
123	Lemari Besi/Metal		2,697,750.00	APBD
124	Printer		1,203,500.00	APBD
125	Printer		2,433,957.00	APBD
126	Meja Kerja Pegawai Non Struktural		650,000.00	APBD
127	Kursi Kerja Pejabat Eselon II		1,186,500.00	APBD
128	Uninterruptible Power Supply (UPS)		1,656,194.00	APBD
129	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA	1,859,206.00	APBD
130	Televisi		1,743,150.00	APBD
131	Tangga Alumunium		745,071.00	APBD
132	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Model : Flustek PS283	5,969,561.00	APBD
133	Uninterruptible Power Supply (UPS)		5,700,000.00	APBD
134	Meja Biro		2,450,000.00	APBD
135	Filling Besi/Metal		2,702,500.00	APBD
136	Meja Kerja Pegawai Non Struktural		601,000.00	APBD
137	Kursi Kerja Pejabat Eselon II		1,186,500.00	APBD
138	Uninterruptible Power Supply (UPS)		1,656,194.00	APBD
139	Lemari Besi/Metal		2,985,735.00	APBD
140	Brankas		2,850,000.00	APBD
141	P.C Unit	Merk PC AIO ASUS Type V222 UAK	9,949,268.00	APBD
142	Lap Top	Merk LENOVO IDEAPAD 3i BMID	7,754,268.00	APBD
143	Televisi		11,599,500.00	APBD
144	Amplifiler		2,100,000.00	APBD
145	Lemari Besi/Metal		2,697,750.00	APBD
146	P.C. Unit		9,000,924.00	APBD
147	Printer (Peralatan Personal Komputer)		3,986,521.00	APBD
148	Televisi		21,700,000.00	APBD
149	Kaca Hias		800,000.00	APBD
150	Meja Kerja Pejabat Eselon III		650,000.00	APBD
151	Lemari Besi/Metal		1,060,000.00	APBD
152	Kursi Putar		1,988,000.00	APBD

No	Nama Barang	Merk / Type	Harga Perolehan	Asal Perolehan
153	Printer		5,027,308.00	APBD
154	Kursi Kerja Pejabat Eselon II		1,186,500.00	APBD
155	Uninterruptible Power Supply (UPS)		1,500,000.00	APBD
156	Digital Versatile Disc/ Digital Video Disc		1,350,000.00	APBD
157	Kursi Putar		692,673.00	APBD
158	Kursi Rapat		651,805.00	APBD
159	AC Unit		8,525,647.00	APBD
160	Filling Besi/Metal		2,702,500.00	APBD
161	Filling Besi/Metal		1,607,885.00	APBD
162	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II		1,112,000.00	APBD
163	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L6170	4,974,634.00	APBD
164	Meja Kerja Pegawai Non Struktural		650,000.00	APBD
165	Lap Top	Merk Asus ExpertBook Type P1440FA	8,039,812.00	APBD
166	Kursi Kerja Pejabat Eselon II		1,186,500.00	APBD
167	Lap Top		8,355,130.00	APBD
168	Printer		2,433,957.00	APBD
169	Papan Visual/Papan Nama	Buatan lokal	1,950,000.00	APBD
170	Meja Biro		1,646,000.00	APBD
171	P.C. Unit		16,576,965.00	APBD
172	Lap Top	Merk Asus ExpertBook Type P1440FA	8,039,812.00	APBD
173	Note Book/NetBook		8,493,519.00	APBD
174	Kursi Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota		3,811,815.00	APBD
175	Lemari Besi/Metal		1,650,000.00	APBD
176	Kursi Rapat		651,805.00	APBD
177	AC Unit		6,644,160.00	APBD
178	Note Book/NetBook		8,493,519.00	APBD
179	Lap Top	Merk Asus ExpertBook Type P1440FA	8,039,812.00	APBD
180	Meja Resepsion		500,000.00	APBD
181	Kursi Putar		1,988,000.00	APBD
182	Meja Biro		3,049,200.00	APBD
183	P.C. Unit		12,025,118.00	APBD
184	Printer		8,178,000.00	APBD
185	Meja Kerja Pejabat Eselon III		650,000.00	APBD
186	Lap Top		8,029,353.00	APBD
187	Filling Besi/Metal		2,681,130.00	APBD
188	Microphone		1,800,000.00	APBD

No	Nama Barang	Merk / Type	Harga Perolehan	Asal Perolehan
189	P.C. Unit		8,501,794.00	APBD
190	Meja Kerja Pegawai Non Struktural		650,000.00	APBD
191	Lap Top	Merk Asus ExpertBook Type P1440FA	8,039,812.00	APBD
192	Papan Visual/Papan Nama	Buatan Lokal	1,900,000.00	APBD
193	Kursi Kerja Pejabat Eselon II		1,186,500.00	APBD
194	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II		4,000,000.00	APBD
195	Papan Visual/Papan Nama	Buatan Lokal	1,900,000.00	APBD
196	AC Unit		7,597,861.00	APBD
197	Meja Biro		1,646,000.00	APBD
198	Mesin Pembuat Huruf		45,837,000.00	APBD
199	P.C Unit		8,282,247.00	APBD
200	Filling Besi/Metal		2,000,000.00	APBD
201	P.C Unit	Merk AIO	16,325,474.00	APBD
202	Filling Besi/Metal		2,702,500.00	APBD
203	Kursi Kerja Pejabat Eselon II		1,186,500.00	APBD
204	Uninterruptible Power Supply (UPS)		902,005.00	APBD
205	Sofa		8,000,000.00	APBD
206	Printer		2,433,957.00	APBD
207	Filling Besi/Metal		2,100,000.00	APBD
208	Meja Kerja Pegawai Non Struktural		601,000.00	APBD
209	Lap Top	ASUS A56KA-FHD422	5,063,745.00	APBD
210	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		962,500.00	APBD
211	Camera Digital		8,608,838.00	APBD
212	Uninterruptible Power Supply (UPS)		902,005.00	APBD
213	Lemari Buku untuk untuk Perpustakaan		6,416,500.00	APBD
214	Meja Biro		1,646,000.00	APBD
215	Kursi Putar		528,000.00	APBD
216	Note Book/NetBook		11,609,918.00	APBD
217	Sepeda Motor	Yamaha 55S (T135SEC)	16,288,575.00	APBD
218	AC Unit		7,597,861.00	APBD
219	P.C. Unit		16,266,667.00	APBD
220	P.C Unit	Merk AIO	16,325,474.00	APBD
221	A.C. Split	MIDEA MSBC-18CRN1	8,024,056.00	APBD
222	Filling Besi/Metal		1,752,000.00	APBD
223	Printer		3,011,330.00	APBD
224	Lap Top	Merk Dell XPS Type 139310i5-113507	15,074,649.00	APBD

No	Nama Barang	Merk / Type	Harga Perolehan	Asal Perolehan
225	Meja Biro		1,646,000.00	APBD
226	Printer (Peralatan Personal Komputer)		3,986,522.00	APBD
227	Filling Besi/Metal		1,752,000.00	APBD
228	Printer		4,312,181.00	APBD
229	Printer		2,433,957.00	APBD
230	Meja Kerja Pejabat Eselon II		850,000.00	APBD
231	Meja Biro		2,467,500.00	APBD
232	Meja Biro		1,637,300.00	APBD
233	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		962,500.00	APBD
234	Kursi Putar		692,673.00	APBD
235	Lemari Besi/Metal		2,300,000.00	APBD
236	Filling Besi/Metal		1,752,000.00	APBD
237	Printer		5,200,000.00	APBD
238	Monitor		1,959,605.00	APBD
239	Kursi Putar		528,000.00	APBD
240	P.C. Unit		8,501,794.00	APBD
241	P.C. Unit		16,473,035.00	APBD
242	Note Book/NetBook		13,750,000.00	APBD
243	Uninterruptible Power Supply (UPS)		1,154,495.00	APBD
244	Kursi Biasa		979,494.00	APBD
245	Kursi Putar		528,000.00	APBD
246	AC Unit		8,525,647.00	APBD
247	Kursi Kerja Pejabat Eselon II		1,186,500.00	APBD
248	P.C Unit		8,282,247.00	APBD
249	Meja Biro		695,000.00	APBD
250	Meja Biro		1,637,300.00	APBD
251	P.C. Unit		5,639,500.00	APBD
252	Note Book/NetBook		8,493,519.00	APBD
253	P.C Unit	Merk PC AIO ASUS Type V222 UAK	9,949,268.00	APBD
254	Lap Top	Merk LENOPO IDEAPAD 3i BMID	7,754,268.00	APBD
255	Tikar		23,866,080.00	APBD
256	Meja Biro		1,637,300.00	APBD
257	P.C Unit	Merk PC AIO ASUS Type V222 UAK	9,949,268.00	APBD
258	Station Wagon	Suzuki Grand Vitara JLX	291,750,000.00	APBD
259	Meja 1/2 Biro		2,496,338.00	APBD
260	P.C Unit		9,475,995.00	APBD
261	Meja Biro		1,650,000.00	APBD
262	Meja Biro		1,622,500.00	APBD
263	Wireless		6,417,771.00	APBD
264	Kursi Biasa		979,494.00	APBD

No	Nama Barang	Merk / Type	Harga Perolehan	Asal Perolehan
265	LCD Projector/Infocus		892,472.00	APBD
266	Tikar		53,451,900.00	APBD
267	Meja Biro		2,467,500.00	APBD
268	P.C. Unit		8,501,794.00	APBD
269	Kursi Kerja Pejabat Eselon II		1,186,500.00	APBD
270	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis		2,361,575.00	APBD
271	Filling Besi/Metal		1,752,000.00	APBD
272	P.C. Unit		45,446,000.00	APBD
273	Sofa		17,344,944.00	APBD
274	Karpet	NOBEL CARPET JAWA	18,345,766.00	APBD
275	Uninterruptible Power Supply (UPS)		1,154,495.00	APBD
276	P.C. Unit		7,080,000.00	APBD
277	Note Book/NetBook		15,056,660.00	APBD
278	Meja Kerja Pegawai Non Struktural		650,000.00	APBD
279	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis		2,361,575.00	APBD
280	Kursi Biasa		979,494.00	APBD
281	Printer		949,655.00	APBD
282	Filling Besi/Metal		1,752,000.00	APBD
283	AC Unit		3,754,460.00	APBD
284	P.C. Unit		15,838,973.00	APBD
285	Note Book/NetBook		10,100,200.00	APBD
286	Meja Biro		1,637,300.00	APBD
287	Meja Biro		1,650,000.00	APBD
288	Kursi Kerja Pejabat Eselon II		1,186,500.00	APBD
289	AC Unit		5,160,270.00	APBD
290	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II		1,112,000.00	APBD
291	Uninterruptible Power Supply (UPS)		1,656,194.00	APBD
292	AC Unit		3,754,460.00	APBD
293	Printer		1,203,500.00	APBD
294	Papan Visual/Papan Nama	Buatan lokal	1,900,000.00	APBD
295	Exhaust Fan		1,800,000.00	APBD
296	Printer		8,178,000.00	APBD
297	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V		610,000.00	APBD
298	Mesin Absensi	Fingerprint Solution, Type X 401	6,667,015.00	APBD
299	Lap Top	Merk LENOVO IDEAPAD 3i BMID	7,754,268.00	APBD
300	Meja Biro		2,467,500.00	APBD
301	Printer		949,655.00	APBD
302	Mesin Absensi		50,527,500.00	APBD

No	Nama Barang	Merk / Type	Harga Perolehan	Asal Perolehan
303	Papan Visual/Papan Nama	Buatan lokal	1,900,000.00	APBD
304	Lap Top	Merk Asus ExpertBook Type P1440FA	8,039,812.00	APBD
305	Kursi Lipat		200,000.00	APBD
306	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		445,000.00	APBD
307	Lambang Instansi		60,000.00	APBD
308	Meja Kerja Pejabat Eselon IV		400,000.00	APBD
309	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V		457,500.00	APBD
310	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V		457,500.00	APBD
311	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		445,000.00	APBD
312	Kalkulator		150,740.00	APBD
313	Kursi Lipat		200,000.00	APBD
314	Lemari Buku untuk untuk Perpustakaan		150,000.00	APBD
315	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		445,000.00	APBD
316	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural		445,000.00	APBD
317	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V		457,500.00	APBD
318	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II		445,000.00	APBD
319	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		445,000.00	APBD
320	Lemari Buku untuk untuk Perpustakaan		150,000.00	APBD
321	Meja Komputer		480,250.00	APBD
322	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V		457,500.00	APBD
323	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V		457,500.00	APBD
324	Meja Kerja Pejabat Eselon IV		400,000.00	APBD
325	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		445,000.00	APBD
326	Kursi Putar		405,000.00	APBD
327	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		445,000.00	APBD
328	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural		445,000.00	APBD

No	Nama Barang	Merk / Type	Harga Perolehan	Asal Perolehan
329	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V		457,500.00	APBD
330	Lambang Instansi		60,000.00	APBD
331	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II		445,000.00	APBD
332	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II		445,000.00	APBD
333	Kalkulator		150,740.00	APBD
334	Kursi Lipat		200,000.00	APBD
335	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural		445,000.00	APBD
336	Kursi Lipat		200,000.00	APBD
337	Meja Kerja Pejabat Eselon IV		400,000.00	APBD
338	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V		457,500.00	APBD
339	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		445,000.00	APBD
340	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		445,000.00	APBD
341	Meja Tamu Biasa		300,000.00	APBD
342	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II		445,000.00	APBD
343	Kursi Lipat		200,000.00	APBD
344	Lemari Buku untuk untuk Perpustakaan		150,000.00	APBD
345	Meja Kerja Pejabat Eselon IV		400,000.00	APBD
346	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V		457,500.00	APBD
347	Kursi Putar		405,000.00	APBD
348	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		445,000.00	APBD
349	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II		445,000.00	APBD
350	Meja Komputer		480,250.00	APBD
351	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural		445,000.00	APBD
352	wirelles		394,300.00	APBD
353	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural		445,000.00	APBD
354	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural		445,000.00	APBD
355	Lemari Buku untuk untuk Perpustakaan		158,000.00	APBD
356	Lemari Buku untuk untuk Perpustakaan		200,000.00	APBD

No	Nama Barang	Merk / Type	Harga Perolehan	Asal Perolehan
357	Meja Kerja Pejabat Eselon IV		400,000.00	APBD
358	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		445,000.00	APBD
359	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V		457,500.00	APBD
360	Kursi Lipat		200,000.00	APBD
361	Lemari Buku untuk untuk Perpustakaan		350,000.00	APBD
362	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II		445,000.00	APBD
363	Lemari Buku untuk untuk Perpustakaan		200,000.00	APBD
364	Kursi Putar		405,000.00	APBD
365	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V		457,500.00	APBD
366	Kursi Putar		405,000.00	APBD
367	Meja Komputer		480,250.00	APBD
368	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II		445,000.00	APBD
369	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V		457,500.00	APBD
370	Meja Kerja Pegawai Non Struktural		330,000.00	APBD
371	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural		445,000.00	APBD
372	Kursi Lipat		200,000.00	APBD
373	Lemari Buku untuk untuk Perpustakaan		350,000.00	APBD
374	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural		445,000.00	APBD
375	Kursi Lipat		200,000.00	APBD
376	Meja Kerja Pejabat Eselon IV		400,000.00	APBD
377	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V		457,500.00	APBD
378	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural		445,000.00	APBD
379	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V		457,500.00	APBD
380	Meja Tulis		100,000.00	APBD
381	Kursi Lipat		200,000.00	APBD
382	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V		457,500.00	APBD
383	Lambang Instansi		60,000.00	APBD
384	Kursi Putar		405,000.00	APBD

No	Nama Barang	Merk / Type	Harga Perolehan	Asal Perolehan
385	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural		445,000.00	APBD
386	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		445,000.00	APBD
387	Lemari Buku untuk untuk Perpustakaan		200,000.00	APBD
388	Lemari Buku untuk untuk Perpustakaan		200,000.00	APBD
389	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		445,000.00	APBD
390	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V		457,500.00	APBD
391	Meja Kerja Pejabat Eselon IV		400,000.00	APBD
392	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		445,000.00	APBD
393	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II		445,000.00	APBD
394	Kursi Lipat		200,000.00	APBD
395	Lemari Buku untuk untuk Perpustakaan JUMLAH		200,000.00 1,841,111,364	APBD

Sumber : Data Aset Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar Tahun 2022

B. PEMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Secara umum yang menjadi isu strategis dalam pelaksanaan beberapa program dan kegiatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Sumber Daya Aparatur.
- 2) Belum optimalnya penataan Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan berbasis kinerja.
- 3) Kebijakan yang mengatur kelembagaan secara nasional bersifat dinamis sehingga memiliki konsekuensi terhadap perubahan Peta Jabatan, Anjab dan ABK, Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan.
- 4) Belum optimalnya pembinaan pelaksanaan inovasi pelayanan publik.
- 5) Belum optimalnya pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.
- 6) Belum optimalnya kinerja, Perjanjian Kerja, LKj dan Perjankin perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalbar.
- 7) Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan penerapan SAKIP.
- 8) Belum optimalnya pembinaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah di Prov. Kalbar.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS (RENSTRA) 2018-2023

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang berfungsi sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja suatu organisasi pada setiap akhir tahun anggaran oleh pimpinan dan *stakeholders* lainnya dengan menggunakan tiga tolok ukur, yaitu masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*).

Guna merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional yaitu strategi yang meliputi kebijakan dan program-program pembangunan.

1. Visi

Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat tidak memiliki Visi dan Misi khusus, namun Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus dapat mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Adapun Visi tersebut adalah **“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”**.

2. Misi

Sesuai dengan visi, maka ditetapkan misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat 2018 – 2023 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut:

- a. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur**, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
- b. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas Dengan Prinsip-prinsip Good Governance**, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu, dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi Bagian Selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang.

- c. **Mewujudkan Kualitas Hidup Masyarakat**, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Peningkatan Pendidikan dan Derajat Kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- d. **Mewujudkan Masyarakat Sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.
- e. **Mewujudkan Masyarakat Yang Tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis antar kelompok etnis, agama, dan wilayah.
- f. **Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan**, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

3. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan, ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Selain itu tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Diharapkan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan (LAN-RI, 2003: 9).

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran, dirancang pula indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing. Dengan demikian sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Adapun tujuan dan sasaran strategis Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar adalah sebagai berikut:

No.	Tujuan Renstra	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan berbasis Kinerja	Meningkatnya perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan berbasis Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran selaras dengan kinerjanya	51%		100%

	Terwujudnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kelembagaan provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah	Persentase kelembagaan provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah		100%	100%
2.	Terwujudnya penyelenggaraan ketatalaksanaan pemerintah daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah	Persentase IKM Perangkat Daerah yang berkategori Baik	85%		
		Meningkatnya penyelenggaraan ketatalaksanaan pemerintah daerah	Persentase kebijakan ketatalaksanaan yang ditetapkan	100%		
	Terwujudnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Kalbar	Nilai IKM Pemerintah Provinsi Kalbar		84	84,2
3.	Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada perangkat Daerah Provinsi	Jumlah perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan reformasi Birokrasi	10 PD		
	Terwujudnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada perangkat Daerah Provinsi dan Kab/ Kota	Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/ Kota dengan nilai Reformasi Birokrasi 60 ke atas		100%	100%
4.	Meningkatnya penyajian pelaporan kinerja (LKj) Pemerintah Prov. Kalbar	Meningkatnya penyajian pelaporan kinerja (LKj) Pemerintah Prov. Kalbar	Komponen SAKIP nilai pelaporan kinerja	11		
	Terwujudnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas laporan kinerja (LKj) Pemerintah Prov. Kalbar	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	11	11,5	12

Sumber Data : Renstra Perubahan Biro Organisasi periode 2018-2023

B. PERJANJIAN KINERJA (PERJANKIN) TAHUN 2022

Adapun sasaran dan indikator sasaran beserta targetnya yang akan dilaksanakan dalam tahun 2022 adalah sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

TABEL 2.1
PERJANJIAN KINERJA
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kelembagaan provinsi yang efektif dan	Persentase kelembagaan provinsi yang efektif dan	100%

	efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah	efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah	
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Kalbar	Nilai IKM Pemerintah Provinsi Kalbar	84,2
3.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada perangkat Daerah Provinsi dan Kab/ Kota	Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/ Kota dengan nilai Reformasi Birokrasi 60 ke atas	100%
4.	Meningkatnya kualitas laporan kinerja (LKj) Pemerintah Prov. Kalbar	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	12

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penataan Organisasi	Rp. 2.229.954.600,00	APBD
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 943.222.196,00	APBD
	Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis	Rp. 3.173.176.796,00	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Tahun 2018-2023, Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 sebagai dasar Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022 yang telah disahkan oleh DPRD menjadi APBD. APBD ini pada hakekatnya merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Pengukuran target kinerja sebanyak 5 (lima) sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat bagi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Adapun rincian pengukuran kinerja Biro Organisasi Setda. Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, sebagai berikut:

**TABEL 3.1
PENGUKURAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya kelembagaan provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah	Persentase kelembagaan provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah	100%	100%	100
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Kalbar	Nilai IKM Pemerintah Provinsi Kalbar	84,2	85.01	100,96
3.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/ Kota dengan nilai Reformasi Birokrasi 60 ke atas	100%	100%	100
4.	Meningkatnya kualitas laporan kinerja (LKj) Pemerintah Prov. Kalbar	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	12	N/A 10,76	N/A

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kelembagaan provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

TABEL 3.2
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022
SASARAN STRATEGIS 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kelembagaan provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah	Persentase kelembagaan provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah	100%	100%	100
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					100%

Berdasarkan tingkat capaian indikator sasaran di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran "**meningkatkan kelembagaan provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah**", mencapai 100% atau dapat dikategorikan "**Berhasil**". Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari tingkat capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana disajikan pada tabel di atas.

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.3
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Meningkatnya kelembagaan provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah	Program Penataan Organisasi	679.770.852	667.463.800	98,18	100%	1,82%

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 98,18% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka pada sasaran ini terdapat Cost Cutting Program efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,82%.

b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya kelembagaan provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah ditunjang oleh program penataan organisasi yang meliputi kegiatan:

1. Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan.

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi fisik sebesar 100% pada Januari s/d Desember 2022 melalui beberapa subkegiatan sebagai berikut:

- 1) Subkegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi terealisasi sebesar Rp.229.198.900,- atau sebesar 99.43% dengan capaian fisik sebesar 100% yang terdiri dari beberapa sub sub kegiatan sebagai berikut:
 - i. Capaian kinerja dari Sub Sub Kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 sebanyak 2 Rapergub Perangkat Daerah dan jumlah Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dilakukan perubahan dan pembentukan sebanyak 4 Pergub Perangkat Daerah, jadi indikator hasil kinerja sebesar 200%.
 - ii. Capaian kinerja dari Sub Sub Kegiatan Updating Database Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota tahun 2022 sebesar 0%.
 - iii. Capaian kinerja dari Sub Sub Kegiatan Penataan Kelembagaan UPT di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar tahun 2022 yaitu Persentase Jumlah UPT Yang Dilakukan Penataan.
 - iv. Capaian kinerja dari Sub Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 yaitu Persentase jumlah Unit Pelaksana Teknis yang dilakukan monitoring dan evaluasi sebesar 100 %.
 - v. Capaian kinerja dari Sub Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 yaitu Persentase jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi sebesar 100%.
- 2) Subkegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp.266.456.400,- atau sebesar 96,16% dengan capaian fisik sebesar 100% yang terdiri dari beberapa sub sub kegiatan sebagai berikut:
 - i. Capaian Kinerja dari Sub Sub Kegiatan tersusunnya Tim Pelaksana Kegiatan dan terselenggaranya kegiatan Rapat Komisariat Wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia dan Pertemuan Penguatan Peran Dharma Wanita Persatuan Bagi Istri Sekretaris Daerah Di Provinsi Kalimantan Barat yaitu tersusunnya Surat Keputusan Komisariat Wilayah Forsesdasi Provinsi Kalimantan Barat adalah terlaksananya kegiatan tersebut dengan baik dengan target 100%.
 - ii. Capaian Kinerja dari Sub Sub Kegiatan pembinaan penataan perangkat daerah kabupaten/kota ini yaitu Persentase kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan terhadap penataan

- perangkat daerah dengan baik dengan target 100% dan capaian indikator tersebut sebesar 100% yaitu 14 Kabupaten/Kota yang dilaksanakan kegiatan pembinaan penataan perangkat sesuai dengan Peraturan yang berlaku sehingga terciptanya kesamaan persepsi antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan penataan organisasi.
- iii. Capaian Kinerja Dari Sub Kegiatan pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah kabupaten/kota ini yaitu Persentase kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan terhadap penataan perangkat daerah dengan baik dengan target 100% dan capaian indikator tersebut sebesar 100% yaitu 14 Kabupaten/Kota yang dilaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian penataan perangkat sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
 - iv. Capaian Kinerja dari Sub kegiatan Rapat Koordinasi yaitu, terlaksananya Rapat Koordinasi yang dilaksanakan pada Tanggal 28 Juli 2022, Pukul 08.00 WIB, bertempat di Ruang Balai Petiti Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Tentang Rapat Koordinasi Pembinaan Kabupaten/Kota pada bidang Organisasi.
- 3) Subkegiatan Penataan Analisis Jabatan terealisasi sebesar Rp.171.808.500,- atau sebesar 99,97% dengan capaian fisik sebesar 100% yang terdiri dari beberapa sub sub kegiatan sebagai berikut:
- i. Capaian Kinerja dari Sub Sub Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 4 (empat) dokumen. Bersamaan dengan hal tersebut, Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar pada T.A 2022 telah berhasil menyelesaikan penyusunan dokumen SKJ Pimpinan Tinggi sebanyak 6 (enam) dokumen. Dengan demikian, keberhasilan capaian target kinerja terhadap penyusunan dokumen SKJ Pimpinan Tinggi telah melampaui target kinerja yang ditentukan pada T.A 2022. Dengan kata lain jika dihitung berdasarkan pendekatan nilai persentase, maka target yang telah ditetapkan jika dibandingkan dengan target yang telah dicapai tahun 2022 telah mencapai sebesar 150%.
 - ii. Capaian Kinerja dari Sub Sub Kegiatan Verifikasi Penyusunan SKJ Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 6 (enam) dokumen. Bersamaan dengan hal tersebut, Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar pada T.A 2022 berhasil menyelesaikan Verifikasi Penyusunan SKJ Administrasi, kamus Kompetensi Teknis dan telah disampaikan Ke kementerian PAN dan RB di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 41 (empat puluh satu) dokumen. Dengan demikian, keberhasilan capaian target kinerja terhadap penyusunan dokumen SKJ Administrasi telah melampaui target kinerja yang ditentukan pada T.A 2022. Dengan kata lain jika dihitung berdasarkan pendekatan nilai persentase, maka target yang telah ditetapkan jika dibandingkan dengan target yang telah dicapai tahun 2022 telah mencapai sebesar 683.33%..
 - iii. Capaian Kinerja Dari Sub Sub Kegiatan Verifikasi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 8 (delapan) dokumen. Bersamaan dengan hal tersebut, Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar pada T.A 2022 telah berhasil menyelesaikan verifikasi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebanyak 13 (tiga belas) dokumen.

Dengan demikian, keberhasilan capaian target kinerja terhadap verifikasi penyusunan analisis beban kerja telah melampaui target kinerja yang ditentukan pada T.A 2022. Dengan kata lain jika dihitung berdasarkan pendekatan nilai persentase, maka target yang telah ditetapkan jika dibandingkan dengan target yang telah dicapai ditahun 2022 telah mencapai sebesar 162,5%. Hal ini disebabkan dengan dukungan tambahan personil pada Sub Bagian Analisis Jabatan yaitu sebanyak 6 (enam) orang analis kepegawaian, yang terdiri dari 4 (empat) Analis Kepegawaian Ahli Madya dan 1 (satu) Analis Kepegawaian Ahli Muda dan 1 (satu) Analis Kepegawaian Ahli Pertama.

- iv. Capaian Kinerja Dari Sub Sub Kegiatan Penyusunan Peta Jabatan Penyederhanaan Birokrasi sebanyak 1 (satu) dokumen. Bersamaan dengan hal tersebut, Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar pada T.A 2022 telah berhasil menyelesaikan penyusunan dokumen Peta Jabatan Penyederhanaan Birokrasi sebanyak 1 (satu) dokumen.

Dengan demikian, keberhasilan capaian target kinerja terhadap penyusunan Peta Jabatan Penyederhanaan Birokrasi telah mencapai target kinerja yang ditentukan pada T.A 2022. Dengan kata lain jika dihitung berdasarkan pendekatan nilai persentase, maka target yang telah ditetapkan telah mencapai sebesar 100%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020-2022 dan target RPJMD

TABEL 3.4
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2020-2022 DAN TARGET RPJMD
SASARAN STRATEGIS 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI (%)			TARGET RENSTRA			Tingkat Kemajuan
			2020	2021	2022	2021	2022	2023	
1.	Meningkatnya perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan berbasis Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran selaras dengan kinerjanya	51	100	100				
	Meningkatnya kelembagaan provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah	Persentase kelembagaan provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah		100	100	100%	100%	100%	

Pada tahun 2020 persentase kelembagaan perangkat daerah yang ditata tepat fungsi, tepat ukuran, dan berbasis kinerja ditargetkan 51%, terealisasi sebesar 51% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Pada tahun 2021 persentase kelembagaan perangkat daerah yang ditata tepat fungsi, tepat ukuran, dan berbasis kinerja sebanyak 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Sementara pada tahun 2022 Persentase kelembagaan

provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah ditargetkan 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Perkiraan untuk Target Tahun 2023 sampai tahun 2024 akan terealisasi sesuai dengan tahun 2022 dikarenakan indikator kinerja diatas sudah diproyeksi akan tercapai sesuai dengan target.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Pada Subkegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi masih ditemukan adanya sedikit perbedaan antara nomenklatur Jabatan Pimpinan Tinggi yang ditetapkan Kementerian PANRB dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Daerah dengan nomenklatur Jabatan Pimpinan Tinggi yang diadopsi/digunakan oleh pemerintah Prov. Kalbar. Perbedaan yang tidak signifikan ini tetap berpengaruh pada proses penyusunan SKJ Pimpinan Tinggi, khususnya pada Kompetensi Teknis yang harus dirumuskan dan disusun kembali dengan menyesuaikan dengan kebutuhan serta divalidasi untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari KemenPANRB baru kemudian dapat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang dalam hal ini adalah Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi.

Pada Subkegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Administrasi terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Administrasi yakni :

- a. Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan pemerintahan belum seluruhnya menyusun kamus kompetensi teknis sebagai bahan untuk menyusun standar kompetensi jabatan, sehingga tim penyusun standar kompetensi jabatan harus menyusun kamus terlebih dahulu yang memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan standar kompetensi jabatan sering diperlukan insidental sehingga diambil solusi hanya mengidentifikasi kompetensi, menentukan level kompetensi selanjutnya menguraikan indikator perilaku pada level kompetensi yang dipilih saja.
- b. Keterbatasan pemahaman pejabat/pelaksana pada perangkat daerah dalam melakukan identifikasi kompetensi teknis serta menyusun kamus kompetensi teknis menyebabkan isi standar kompetensi jabatan administrasi yang diusulkan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap jabatan yang disusun.
- c. Jumlah personil khususnya pada bagian analisis jabatan dan kepegawaian terbatas. Demikian pula dengan pemahaman para personil penyusunan standar kompetensi terkait kompetensi teknis dikarenakan *background* pendidikan dan pengalaman pekerjaan yang berbeda dengan kompetensi teknis yang diverifikasi, sehingga kesulitan dalam menilai kebenaran dari SKJ administrasi yang disusun.
- d. Kegiatan konsultasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi yang telah dialokasikan dalam rekening belanja perjalanan dinas luar daerah T.A. 2022 pada Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar.

Pada Subkegiatan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi antara lain :

- a. Penyusunan format analisis beban kerja masih terdapat kekeliruan sehingga masih terdapat bagian-bagian yang terlewatkan.
- b. Uraian tugas tidak mencerminkan nama jabatan khususnya pada level pelaksana dikarenakan kemampuan dari penyusunan analisis beban kerja terbatas khususnya uraian tugas teknis.
- c. Uraian tugas pada jabatan administrasi belum menunjukkan tugas teknis yang harus dilakukan pejabat dimaksud.
- d. Jumlah pemegang jabatan tidak sesuai dengan hasil pembulatan analisis beban kerja.
- e. Dalam perhitungan waktu masih sering terjadi kesalahan, sehingga jumlah pegawai yang di tentukan masih sering terjadi kekeliruan.

Pada Subkegiatan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional terdapat beberapa hambatan yaitu:

- a. Nomenklatur Jabatan Fungsional yang telah ditetapkan oleh kementerian pembina teknis belum semuanya dapat mengakomodir atau mewadahi peralihan Pejabat Administrasi ke dalam jabatan fungsional. Sehingga masih perlu menetapkan nomenklatur Jabatan Fungsional (JF) yang baru. Hal ini mengakibatkan ambiguitas pada saat pemetaan pengalihan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.
- b. Perbedaan pemahaman antara SDMA pada Perangkat Daerah dengan Panitia Pelaksana Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap pengejawantahan Permen PAN dan RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, sehingga Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar masih harus melakukan sosialisasi dalam rangka pembinaan Perangkat Daerah, khususnya mengenai pemahaman pengisian format pemetaan terhadap materi/data/bahan yang harus disiapkan untuk mengisi format pemetaan dan mekanisme Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional sesuai lampiran Permen PAN dan RB Nomor 28 Tahun 2019.
- c. Adanya desakan dari Pemerintah Pusat khususnya Kementerian PAN dan RB dan Kementerian Dalam Negeri terhadap Pemerintah Daerah yang menyebabkan kegiatan ini terkesan dipaksakan dan mendadak, hal ini dapat dilihat dari sarana dan prasarana administrasi yang belum dipersiapkan secara *holistic*. Sebagai contoh, masih banyak nomenklatur Jabatan Fungsional yang masih harus ditetapkan untuk mewadahi Jabatan Administrasi yang secara tugas dan fungsinya belum tercover dalam Nomenklatur Jabatan Fungsional yang sudah ada atau eksisting.
- d. Perbedaan sudut pandang mengenai kewenangan, tugas dan tanggungjawab antara Kementerian PAN dan RB dan Kementerian Dalam Negeri serta BKN. Hal ini menyebabkan kementerian sebagaimana dimaksud, saling mempertahankan egosentrisnya dan masing-masing Kementerian tersebut terkesan hanya menunjukkan eksistensi kelembagaannya secara parsial dan tentu saja hal ini berakibat negatif secara signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah karena menimbulkan ambiguitas di daerah.
- e. Belum adanya kebijakan terkait pemenuhan kompetensi teknis atas pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan dan pedoman terkait pola hubungan kerja antara jabatan administrasi dengan jabatan fungsional.
- f. Jumlah personil khususnya pada Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan terbatas. Demikian pula dengan pemahaman para personil penyusunan standar kompetensi terkait kompetensi teknis dikarenakan *background* pendidikan, motivasi dan pengalaman pekerjaan yang berbeda.

Pada Subkegiatan Penataan UPT terdapat kendala yaitu, Durasi waktu yang cukup lama terkait rekomendasi dari Direktorat Jendral Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri sehingga menghambat proses penetapan peraturan Gubernur.

Pada Subkegiatan updating Database Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Tahun 2022 dikarenakan rasionalisasi anggaran sehingga kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana.

Pada Subkegiatan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yaitu, Durasi waktu yang cukup lama terkait rekomendasi dari Direktorat Jendral Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri sehingga menghambat proses penetapan peraturan Gubernur.

Pada Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, dengan adanya pandemi Covid 19 maka kegiatan monev UPT yang sedianya akan dilakukan secara langsung ke 23 UPT dilakukan dengan cara mengirimkan kuesioner yang disampaikan melalui Perangkat Daerahnya untuk disampaikan ke UPT masing-masing.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Agar pelaksanaan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, maka perlu keseriusan, ketekunan, ketelitian, peningkatan pemahaman dan pengetahuan khususnya terkait tugas teknis pada semua perangkat daerah, serta kesempatan untuk melakukan komunikasi secara langsung dengan berbagai Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan pemerintahan. Untuk mendukung hal tersebut, tim penyusun harus disupport dengan peningkatan kompetensi dalam menyusun standar kompetensi jabatan yang benar, diberikan akses kepada Aparatur Sipil Negeranya untuk berkomunikasi dengan Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan pemahaman terkait tugas-tugas teknis yang dikelola oleh Perangkat Daerah khususnya untuk Pimpinan Tinggi. Penambahan personil yang memiliki kapasitas, kemampuan, motivasi dan memenuhi kualifikasi persyaratan untuk ditugaskan pada bidang kelembagaan dan analisis jabatan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi yang diselenggarakan khususnya dalam hal penyusunan standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi.

Agar pelaksanaan verifikasi Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, maka perlu keseriusan, ketekunan, ketelitian, peningkatan pemahaman dan pengetahuan khususnya terkait tugas teknis pada semua perangkat daerah, serta kesempatan untuk melakukan komunikasi secara langsung dengan berbagai Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan pemerintahan, untuk mendukung hal tersebut, tim verifikasi harus didukung dengan peningkatan kompetensi dalam memverifikasi standar kompetensi jabatan yang benar, diberikan peluang yang seluas-luasnya untuk berkomunikasi dengan Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan pemahaman terkait tugas-tugas teknis yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang tersebar dalam berbagai jabatan. Penambahan personil yang potensial untuk membantu verifikasi penyusunan standar kompetensi jabatan administrasi.

Agar pelaksanaan Verifikasi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar yang disusun oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, maka perlu adanya komitmen dari tim penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di masing-masing unit kerja akan pentingnya menyusun dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan baik dan benar dalam upaya melakukan penataan di bidang kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengawasan. Oleh karena itu salah satu bentuk komitmen dimaksud dengan menganggarkan kegiatan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja bagi perangkat daerah ataupun unit pelaksana teknis yang belum menyusun pada setiap tahun anggaran secara konsisten, serta melakukan kaderisasi dan transfer knowledge para Analis Kepegawaian dan Analis Jabatan atau pemantapan kompetensi di bidang kepegawaian secara berkesinambungan sehingga eksistensi Analis Kepegawaian dan Analis Jabatan di setiap unit kerja dapat terus tersedia.

Agar Penyederhanaan Birokrasi dilaksanakan secara simultan dengan pembentukan Jabatan Fungsional baru untuk memwadahi peralihan Pejabat Pengawas yang ditiadakan atau nomenklatur Jabatan administrasi yang secara tugas dan fungsi tidak berkesesuaian ataupun belum diakomodir dalam nomenklatur Jabatan Fungsional yang ada ataupun eksisting. Adanya persamaan persepsi antara 3 (tiga) Kementerian terkait yakni Kementerian PAN dan RB, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara mengenai konsep Penyederhanaan Birokrasi khususnya mengenai Kementerian/Lembaga mana yang menjadi *Leading Sektor* pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi, sehingga tidak terjadi ambiguitas pemahaman pada tataran Pemerintah Daerah. Dan sebaiknya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat disampaikan melalui Kementerian Koordinator dan tidak secara parsial diterbitkan oleh masing-masing Kementerian secara mandiri. Penambahan personil yang memiliki kapasitas, kemampuan, motivasi dan memenuhi kualifikasi persyaratan untuk ditugaskan pada bidang kelembagaan dan analisis jabatan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi yang diselenggarakan khususnya dalam hal penyusunan Peta Jabatan Fungsional (Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pada Subkegiatan updating database kelembagaan perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022 tetap dapat dilaksanakan, meskipun adanya rasionalisasi anggaran, dengan mengupdate kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan penataan pada tahun 2022.

Pada Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara menyampaikan kuesioner ke UPT melalui Perangkat Daerahnya.

Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Kalbar

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

TABEL 3.5
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022
SASARAN STRATEGIS 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Kalbar	Nilai IKM Pemerintah Provinsi Kalbar	84	85.01	100,96%
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					

Realisasi capaian kinerja IKM Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 yang berkategori baik ditargetkan sebanyak 84 dan terealisasi sebanyak 85,01 dengan capaian kinerja sebesar 100,96%.

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.6
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Kalbar	Program Penataan Organisasi	578.790.427	578.790.427	100	100,96	0,96%

Realisasi anggaran tahun 2022 sebesar 100%, realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100,96%, maka pada sasaran ini terdapat Cost Cutting Program efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,96%.

b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Kalbar ditunjang oleh program penataan organisasi yang meliputi kegiatan:

1. Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.

Kegiatan ini mempunyai 3 output dengan realisasi sebagai berikut:

 - a. Persentase Perangkat Daerah dengan standar pelayanan publik yang baik dan berkualitas (zona hijau) dengan realisasi sebesar 89% dengan capaian kinerja 100%.
 - b. Persentase perangkat daerah yang menetapkan dokumen tatalaksana (SOP dan Peta Proses Bisnis) dengan realisasi sebesar 50% dengan capaian output kinerja 50%.
 - c. Persentase kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dengan realisasi sebesar 0% dengan capaian output kinerja 0%.

Output kinerja kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja ditunjang oleh dua subkegiatan sebagai berikut:

1) Subkegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik memiliki beberapa output kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 1 Laporan. Hasil pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Hasil pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Laporan SKM Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 berisi kompilasi laporan hasil SKM pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik/UPP (Perangkat Daerah, Biro, dan UPT) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan laporan SKM Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalbar.
2. Untuk Tahun 2021, sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) Perangkat Daerah (100 %), 9 (sembilan) Biro (100 %), dan 24 (dua puluh empat) UPT (60 %) di lingkungan Pemprov Kalbar yang melaksanakan SKM. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemprov Kalbar yang merupakan hasil dari pelaksanaan SKM Tahun 2021 adalah 85,01 dengan kategori Baik (B). Nilai ini meningkat 0,83 poin dari tahun sebelumnya (2020) yaitu 84,18. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 (empat belas) UPP meraih IKM dengan kategori A (Sangat Baik), yaitu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (95,08); Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (95,05); Biro Organisasi (93,56); Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (93,01); Badan Pengelola Perbatasan Daerah (91,97); Dinas Sosial (91,02); Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (90,69); Dinas Komunikasi dan Informatika (90,69); Biro Pengadaan Barang/Jasa (90,24); UPT Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Klinik Hewan (89,60); Dinas Perkebunan dan Peternakan (89,04); Dinas Ketahanan Pangan (88,89); Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (88,77); dan Biro Hukum (88,58).
3. Sementara itu, terdapat 22 (dua puluh dua) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) yang melaksanakan SKM dengan responden sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih, yaitu : RSUD dr. Soedarso (1.666 orang); Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (337 orang); Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (315 orang); Rumah Sakit Jiwa Provinsi (225 orang); UPT Klinik Utama Sungai Bangkong (200 orang); Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (171 orang); UPT Panti Sosial dan Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma (139 orang); UPT Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Klinik Hewan (132 orang); Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (125 orang); UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih (120 orang); Biro Administrasi Pimpinan (105 orang); UPT Museum (100 orang); UPT Laboratorium Kesehatan (100 orang); UPT Laboratorium Kesehatan Kerja (100 orang); Dinas Perhubungan (100 orang); Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (100 orang); UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (100 orang); Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (100 orang); Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (100 orang); Satuan Polisi Pamong Praja (100 orang); Badan Keuangan dan Aset Daerah (100 orang); dan Badan Penghubung (100 orang).

4. Adapun dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, seluruhnya (100 %) telah menyampaikan Laporan SKM Tahun 2021. IKM rata-rata Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2021 adalah 84,20 dengan kategori Baik. Nilai ini meningkat 0,74 poin dari tahun sebelumnya (2020). Untuk nilai IKM tertinggi yaitu Kota Pontianak (88,61) dan Kabupaten Landak (88,51). Untuk jumlah responden terbanyak yaitu Kabupaten Kapuas Hulu (4.249 orang) dan Kabupaten Sanggau (3.931 orang), sedangkan Kabupaten dengan UPP terbanyak melaksanakan SKM yaitu Kabupaten Ketapang (73 UPP) dan Kota Pontianak (73 UPP).
5. Untuk IKM Provinsi Kalbar tahun 2021 adalah 84,61 dengan kategori B (Baik), yang terdiri dari IKM Pemprov Kalbar (85,01) dan IKM Kabupaten/Kota se-Kalbar (84,20). Nilai ini meningkat 0,79 poin dari tahun sebelumnya (2020).
 - Hasil pelaksanaan kegiatan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Kalimantan Barat adalah Peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Barat (sivablik) Tahun 2022 berjumlah sebanyak 97 inovasi yang mendaftar, yang terdiri dari 25 inovasi dari 19 Perangkat Daerah/Biro/UPT di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, serta 52 inovasi dari 12 Kabupaten/Kota se-Kalbar. Terdapat 2 Kabupaten yang tidak mengikuti kompetisi yaitu Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sintang. Urutan pemenang dalam pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik adalah sebagai berikut :
 - A. TOP 3 Kelompok Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat :
 - Juara 1 :
"Sistem Simulasi Dan Informasi Desa Mandiri (SIMULIASARI)"
DPMD Prov. Kalbar
 - Juara 2 :
"Green Collaboration "
DLHK Prov. Kalbar
 - Juara 3 :
"Klinik Hati Jasoka"
Disnakertrans Prov. Kalbar
 - B. TOP 3 Kelompok Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat :
 - Juara 1 :
"Seledri Terintegrasi (Selesai Dalam Sehari Terintegrasi)"
Disdukcapil Kab. Kubu Raya.
 - Juara 2 :
"Klinik Sehati (Klinik Sehat Untuk Penderita HIV AIDS)"
UPT Puskesmas Gang Sehat Kota Pontianak.
 - Juara 3 :
"ALAMAK KARIMATA (Anak Lahir Mendapatkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga)"
UPT Puskesmas Pelapis Kayong Utara.
 - C. TOP 6 Kelompok Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat :
 1. "Green Colaborations" dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 2. "Khatulistiwa One Map (KOM)" dari Badan Penelitian dan Pengembangan.
 3. "Klinik Hati Jasoka" dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 4. "MBAK KEPO (Mobile Acceleration Kolaborasi Kepariwisata, Ekraf, Pemuda, Olahraga)" dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
 5. "SENTARUM (Selamatkan Lingkungan Kita dari Perusakan dan Pencemaran).

6. "SIMULIASARI (Sistem Simulasi Dan Informasi Desa Mandiri)" dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

D. TOP 6 Kelompok Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat :

1. "ALAMAK KARIMATA (Anak Lahir Mendapatkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga)" dari UPT Puskesmas Pelapis Kayong Utara
 2. "DEBAR" (Delivery Buku Antar)" dari Dinas Perpustakaan Kota Pontianak.
 3. "Klinik Sehati (Klinik Sehat Untuk Penderita HIV AIDS)" dari UPT Puskesmas Gang Sehat Kota Pontianak.
 4. "POJOK PINTAR" dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang.
 5. "Seledri Terintegrasi (Selesai Dalam Sehari Terintegrasi)" dari Disdukcapil Kab. Kubu Raya.
 6. "SICEPOY (Sistem Cepat Operasi Yustisi)" dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.
- Jumlah PD/ Biro yang dimonitoring dan dievaluasi dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 45 Perangkat Daerah/ Biro. Untuk pencapaian jumlah Perangkat Daerah / Biro / UPT yang dimonitoring dan dievaluasi dapat dikatakan mencapai 100%, ini dikarenakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang sebelumnya pada Perda Nomor 8 Tahun 2016 berjumlah 114 Perangkat Daerah / Biro / UPT tetapi pada Perda Nomor 11 Tahun 2019 berubah menjadi 102 Perangkat Daerah / Biro / UPT.
 - Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tidak terlaksana pada tahun 2022 dikarenakan adanya pemotongan anggaran.
 - Jumlah Kab/ Kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan publik melalui kunjungan langsung dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 14 Kab/ Kota dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 1 Laporan. Hasil pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :
 1. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang dievaluasi yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil); serta UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah I (SAMSAT) Provinsi Kalbar.
 2. Untuk hasil penilaian berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1035 Tahun 2022 Tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :
 - DPM-PTSP Provinsi Kalimantan Barat mendapat urutan ke 11 dengan nilai 4,46 Kategori A- dari 34 Provinsi se-Indonesia
 - Sistem Manunggal Satu Atap/Samsat Provinsi Kalimantan Barat mendapat urutan ke 13 dengan nilai 4,38 kategori A- dari 34 Provinsi se-Indonesia
 - DPM-PTSP Kabupaten Sanggau mendapat nilai 4,51 kategori A.

- DPM-PTSP Kota Pontianak mendapat nilai 4,44 Kategori A-
- DPM-PTSP Kabupaten Sintang mendapat nilai 4,26 kategori A-
- DPM-PTSP Kabupaten Mempawah mendapat nilai 3,82 kategori B.
- DPM-PTSP Kabupaten Sambas mendapat nilai 3,77 kategori B.
- DPM-PTSP Kabupaten Landak mendapat nilai 3,43 kategori B.
- DPM-PTSP Kabupaten Kapuas Hulu mendapat nilai 3,39 kategori B.
- DPM-PTSP Kabupaten Melawi mendapat nilai 2,66 kategori C.
- Disdukcapil Disdukcapil Kabupaten Sanggau mendapat Nilai 4,41 kategori A.
- Kabupaten Kubu Raya mendapat Nilai 4,18 kategori A-
- Disdukcapil Kota Pontianak mendapat Nilai 4,16 kategori A-
- Disdukcapil Kabupaten Ketapang mendapat Nilai 4,03 kategori A-
- Disdukcapil Kabupaten Mempawah mendapat Nilai 3,81 kategori B.
- Disdukcapil Kabupaten Sintang mendapat Nilai 3,65 kategori B.
- Disdukcapil Kabupaten Kapuas Hulu mendapat Nilai 3,6 kategori B.
- Disdukcapil Kabupaten Sambas mendapat Nilai 3,28 kategori B.
- Disdukcapil Kabupaten Sekadau mendapat Nilai 3,11 kategori B-
- Disdukcapil Kabupaten Bengkayang mendapat Nilai 2,91 kategori C.
- Disdukcapil Kabupaten Melawi mendapat Nilai 2,14 kategori C-

2. Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pemprov Kalbar pada tahun 2022 mendapat nilai 4,42 kategori A - Sangat Baik.
 - 2) Subkegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan memiliki beberapa output kinerja sebagai berikut:
 - i. Indikator kinerja yang telah ditetapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penataan Tatalaksana berjalan dengan baik pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dimana terdapat 45 perangkat daerah dan beberapa UPT di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang sudah di monitoring dan evaluasi pada bidang tatalaksana pemerintahan. Untuk pelaksanaan tata naskah dinas masih terdapat perangkat daerah yang masih belum sesuai dengan peraturan Gubernur dalam pelaksanaannya kemudian Secara keseluruhan untuk pakaian dinas pada perangkat daerah sudah sesuai Peraturan Gubernur. Selain itu juga Perangkat daerah sudah memiliki data SOP dan juga Peta Proses Bisnis yang sudah dibuat serta Penyesuaian jam kerja pada perangkat daerah telah disesuaikan dengan Peraturan Gubernur yang berlaku.
 - ii. Indikator kinerja yang telah ditetapkan dari pelaksanaan kegiatan Asistensi Penyusunan SOP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah Jumlah Perangkat Daerah/ Biro yang SOPnya telah diverifikasi sebanyak 45 Perangkat Daerah pada kesempatan pertama adalah verifikasi SOP khusus pada bidang masing-masing perangkat daerah yang mana subkoordinator hadir dalam kegiatan ini. selanjutnya SOP yang disusun berdasarkan

- mekanisme kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- iii. Indikator kinerja yang telah ditetapkan dari pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Tatalaksana Pemerintah adalah :
1. Perangkat Daerah secara khusus pejabat administrator dapat memahami pelaksanaan Tata Naskah Dinas, sehingga pelaksanaan tata naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memiliki keseragaman dan juga dapat berjalan dengan baik.
 2. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan pemahaman tentang Sistem Kerja terbaru sesuai dengan Perpempnan RB Nomor 7 Tahun 2022.
 3. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Tatalaksana menjadi acuan untuk pelaksanaan tatalaksana pemerintahan kearah yang lebih baik.
- iv. Indikator kinerja yang telah ditetapkan dari pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan bidang ketatalaksanaan ini adalah Jumlah Peraturan Gubernur yang ditetapkan adalah 1 (satu) Peraturan Gubernur. Untuk melakukan penyesuaian sistem kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya akan mengeluarkan Petunjuk Teknis terhadap Permenpan Nomor 7 Tahun 2022 sebagai panduan bagi pemerintah daerah untuk membuat pedoman sistem kerja sebagaimana dimaksud, namun sampai saat ini belum ada petunjuk teknis yang dapat dijadikan acuan, oleh karena itu Biro Organisasi belum menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Kerja. Namun selain draft peraturan gubernur tentang sistem kerja, pada tanggal 7 Maret 2022 telah ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dengan demikian maka capaian kinerja pada kegiatan ini adalah 1 (satu) Peraturan Gubernur yang telah ditetapkan dan 1 (satu) draft Peraturan Gubernur. Selanjutnya pada tahun 2023, setelah ditetapkan Petunjuk Teknis Permenpan 7 Tahun 2022 direncanakan akan dilanjutkan kembali penyusunan Peraturan Gubernur tentang sistem kerja dan sosialisasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020–2022 dan target Renstra 2021-2023

TABEL 3.7
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2020-2022 DAN TARGET RPJMD
SASARAN STRATEGIS 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET RENSTRA			Tingkat Kemajuan
			2020	2021	2022	2021	2022	2023	
2.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah	Persentase IKM Perangkat Daerah yang berkategori Baik	81,33%						
		Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM Sangat Baik			20,29		25		
	Meningkatnya penyelenggaraan ketatalaksanaan pemerintah daerah	Persentase kebijakan ketatalaksanaan yang ditetapkan	100%						
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Kalbar	Nilai IKM Pemerintah Provinsi Kalbar		85,01	85,01	84	84,2	84,5	

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Kalimantan Barat setiap tahunnya mengalami peningkatan dan melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2020 mencapai 81,33% dan 100%, pada tahun 2021 realisasinya mencapai 85,01% dan 100%. Sedangkan untuk tahun 2022 capaian Nilai IKM Pemerintah Provinsi Kalbar sebesar 85,01 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan namun tetap lebih target yang telah ditetapkan.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Adapun permasalahan yang ditemui dari hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan publik di lingkungan Pemprov. Kalbar, belum semua perangkat daerah/UPT dapat dilakukan monitoring secara langsung dikarenakan keterbatasan waktu dan jumlah personil. Disamping itu juga untuk pelaksanaan asistensi masih terdapat beberapa Perangkat Daerah/Biro/UPT yang tidak dapat menghadiri kegiatan asistensi yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah adanya pemotongan anggaran, sehingga kegiatan ini tidak dapat terlaksana.

Adapun permasalahan yang ditemui dari hasil pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, belum semua Kabupaten/Kota dapat dilakukan pembinaan dan pengawasan secara langsung dikarenakan keterbatasan anggaran waktu dan jumlah personil dalam melakukan pembinaan. Selain itu kabupaten/kota juga meminta

apabila diselenggarakan kegiatan sosialisasi/workshop/bimtek juga dapat mengundang perangkat daerah kabupaten/kota.

Dari hasil pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Barat terdapat kendala yang ditemui yaitu, masih banyak Perangkat Daerah baik dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun dilingkungan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat yang belum mengikuti kompetisi Inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan selain belum adanya gambaran mengenai inovasi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masing-masing unit penyelenggara, keterbatasan anggaran dan kurangnya sumber daya manusia juga merupakan kendala untuk mewujudkan terciptanya inovasi bagi unit penyelenggara pelayanan.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Bimtek Survei Kepuasan Masyarakat terdapat beberapa kendala yang ditemui, yaitu masih terdapat beberapa Biro / Perangkat Daerah / UPT di Lingkungan Pemprov. Kalbar yang tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan padatnya jadwal dari masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan serta ketidak adanya anggaran untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan dimaksud terutama bagi Unit Penyelenggara Pelayanan yang berada di Kabupaten.

Dalam pelaksanaan kegiatan Asistensi Standar Operasional Prosedur diLingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu :

- a. Tidak semua Subkoordinator bidang masing-masing perangkat daerah ikut dalam kegiatan ini, dikarenakan ada kegiatan lain dan dinas luar.
- b. Pemahaman akan pembuatan SOP masih kurang sehingga perlu konsultasi lebih lanjut dalam proses pembuatan SOP di bidang masing-masing perangkat daerah.
- c. Masih kurangnya pemahaman terhadap pola kerja terbaru sehingga terjadi perubahan proses pembuatan SOP yang disesuaikan dengan mekanisme kerja terbaru.

Dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Tatalaksana, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu :

- a. Kegiatan pelaksanaan Sosialisasi Tata Naskah Dinas yang sebelumnya di ruang Praja II di alihkan secara virtual meeting karena terkendala teknis.
- b. Tidak semua pejabat administrator hadir dalam kegiatan ini dikarenakan tugas dan pekerjaan yang lain.
- c. Belum semua Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memahami Sistem Kerja terbaru sesuai Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022, sehingga perlu dilakukan sosialisasi yang berkelanjutan.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Barat dapat disampaikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut :

- 1) Mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten dan berkelanjutan.
- 2) Menindaklanjuti hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dinilai rendah oleh responden, dengan upaya tindak lanjut jangka pendek dan

menengah serta melakukan upaya-upaya percepatan pelayanan seluruh jenis layanan di unit kerja.

- 3) Terkait dengan hasil penilaian per unsur pelayanan dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut :
 - a) Memberikan informasi terkait pengelolaan pengaduan secara lebih jelas dan lengkap;
 - b) Mempertahankan dan meningkatkan penanganan pengaduan yang baik;
 - c) identifikasi faktor apakah yang membuat kecepatan pelayanan mendapatkan nilai terendah dibanding unsur lainnya, apakah dari prosedurnya atau petugasnya,
 - d) Mempertahankan dan meningkatkan pencantuman nominal biaya maupun pernyataan pelayanan gratis / tanpa biaya untuk pelayanan yang berbayar maupun pelayanan yang gratis (tanpa biaya);
 - e) penempatan petugas yang sesuai untuk pelayanan;
 - f) pemberian pelatihan secara rutin dan berkelanjutan mengenai pelayanan publik maupun terkait tugas pokok dan fungsi serta perkembangan teknologi informasi kepada petugas pelayanan;
 - g) pemberian insentif khusus untuk petugas pelayanan;
 - h) pemberian reward / apresiasi untuk petugas pelayanan terbaik;
 - i) pemberian punishment / hukuman untuk petugas pelayanan yang buruk;
 - j) melakukan evaluasi secara berkala dan berjenjang;
 - k) Melakukan pembahasan tentang penyederhanaan persyaratan pelayanan;
 - l) Memberikan kemudahan untuk mengakses pelayanan;
 - m) Meningkatkan tampilan informasi tentang persyaratan pelayanan yang lebih jelas dan meluas, misalnya dipajang di ruang layanan, pamflet, brosur, media sosial, media cetak, media massa, dll.
 - n) tidak berbelit-belit dalam pelayanan;
 - o) mempermudah prosedur pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - p) memaksimalkan penggunaan sarana prasaranan yang ada;
 - q) mengadakan sarana prasaranan yang belum tersedia atau belum memadai;
 - r) meningkatkan kualitas dan kenyamanan sarana dan prasarana terkait pelayanan publik misalnya perbaikan/renovasi gedung atau pembangunan ruang khusus pelayanan;
 - s) Meningkatkan kenyamanan ruang tunggu/ruang pelayanan seperti penyediaan pendingin udara, sofa / kursi empuk, bahan baca, internet gratis, air minum / permen, televisi, ruang laktasi, tempat bermain anak, tempat sholat, tempat parkir, dll;
 - t) Memperhatikan fasilitas dan pelayanan untuk pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti prioritas layanan, ram, jalur landa, tambatan, kursi roda, toilet khusus, parkir khusus, dll;
 - u) Pembangunan mal pelayanan publik;
- 4) Melakukan asistensi, bimbingan, monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan kepada seluruh Perangkat Daerah/Biro/UPT di Lingkungan Pemprov Kalbar maupun kepada seluruh Bagian Organisasi beserta beberapa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se-Kalbar terkait pelaksanaan dan penyusunan laporan SKM pada triwulan ke-2 s.d. triwulan ke-4 setiap tahunnya untuk meningkatkan jumlah UPP yang menyampaikan laporan SKM maupun meningkatkan kualitas dari laporan SKM tersebut. Hal ini juga untuk melihat bagaimana tindak lanjut yang

dilakukan oleh Perangkat Daerah/Biro/UPT terhadap hasil SKM setiap tahunnya.

- 5) Melaksanakan Bimbingan Teknis Pelaksanaan SKM dan Penyusunan Laporan SKM pada triwulan ke-3 setiap tahunnya untuk meningkatkan jumlah UPP yang menyampaikan laporan SKM maupun meningkatkan kualitas dari laporan SKM tersebut.
- 6) Meminta Kabupaten/Kota se-Kalbar agar seluruh UPP nya dapat melaksanakan dan menyampaikan laporan SKM.
- 7) Menyurati seluruh Perangkat Daerah/Biro/UPT di Lingkungan Pemprov Kalbar maupun kepada seluruh Kabupaten/Kota se-Kalbar terkait pelaksanaan SKM dan penyampaian laporan SKM.
- 8) Pengembangan inovasi SEKAM PADI (Survei Kepuasan Masyarakat Aplikasi Daring) yaitu aplikasi SKM secara online dan elektronik yang dibuat dan dikembangkan oleh Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar, termasuk menyelenggarakan bimtek terkait penggunaan aplikasi tersebut.
- 9) Mendorong UPP yang menyelenggarakan pelayanan secara langsung untuk melaksanakan SKM per bulan atau minimal per tri wulan dan mendorong UPP yang menyelenggarakan pelayanan secara tidak langsung untuk melaksanakan SKM per tri wulan atau per semester.
- 10) Untuk penyusunan Laporan SKM Provinsi Kalbar kedepannya dapat diubah waktu pelaksanaannya menjadi dilaksanakan mulai triwulan ke-3 dan diharapkan dapat diselesaikan pada triwulan ke-4 tahun berjalan yang sama antara tahun pelaksanaan SKM dengan tahun penyusunan laporannya.

Sedangkan solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan permasalahan yang ditemui dari hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan publik di lingkungan Pemprov. Kalbar yaitu dengan memberikan kesempatan kepada Perangkat Daerah/Biro/UPT untuk berkonsultasi ke Biro Organisasi guna mendapat penjelasan lebih lanjut, dan untuk monitoring secara langsung akan diupayakan penyusunan jadwal yang lebih baik dan terencana pada tahun yang akan datang.

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan Sub Subkegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yaitu jika kedepannya kegiatan sosialisasi ini akan dilaksanakan kembali sebaiknya dapat dianggarkan sesuai dengan kebutuhan agar didalam pelaksanaan kegiatan tidak mengalami hambatan.

Solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan terhadap Kabupaten/Kota yang belum dilakukan pembinaan dan pengawasan yaitu dengan melakukan pembinaan dan pengawasan secara virtual guna membahas hal-hal yang menjadi kendala Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan permintaan kelengkapan data pendukung yang diperlukan dapat dikirim melalui email atau website Biro Organisasi.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada perangkat Daerah Provinsi dan Kab/ Kota.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

TABEL 3.11
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022
SASARAN STRATEGIS 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota	Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota dengan nilai Reformasi Birokrasi 60 ke atas	100%	100%	100%
Capaian Kinerja Sasaran 4					

Realisasi capaian kinerja Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota dengan nilai Reformasi Birokrasi 60 ke atas Tahun 2022 ditargetkan sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.12
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(%)	%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota	Program Penataan Organisasi	525,020,200	520,951,800	99.22	100	0,78

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran pada program penataan organisasi sebesar 100% dengan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 99,22%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 0,78%.

b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya-upaya untuk mencapai Sasaran Strategis 3 tersebut di atas, melalui pelaksanaan Program Penataan Organisasi.

A. Program Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota ditunjang oleh program penataan organisasi yang meliputi kegiatan:

2. Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.

Kegiatan ini mempunyai 3 output dengan realisasi sebagai berikut:

- a. Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 45 Perangkat Daerah/ Biro.
- b. Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian output kinerja 5 Kabupaten/ Kota.
- c. Persentase Kabupaten/ Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian output kinerja 100%.

Output kinerja kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja ditunjang oleh dua subkegiatan sebagai berikut:

1) Subkegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi memiliki beberapa output kinerja sebagai berikut:

- i. Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 1 Laporan.

Pelaksanaan Fasilitasi Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu bentuk pembinaan percepatan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memberikan arahan dan panduan pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan langkah-langkah percepatan reformasi birokrasi yang selaras dengan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional dan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Hasil pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut selanjutnya dilakukan penilaian mandiri melalui pengisian LKE PMPRB baik offline maupun online dengan melampirkan evidence (bukti dukung). LKE PMPRB tersebut akan dinilai oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, dan Tim Penilai dari Kementerian PAN dan RB.

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan Fasilitasi Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada seluruh Perangkat Daerah secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya, serta untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun berikutnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Biro Organisasi Setda Prov Kalbar telah melaksanakan Fasilitasi Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui langkah – langkah konkrit sebagai berikut :

1. Rapat internal Tim RB Biro Organisasi dalam rangka persiapan pelaksanaan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penyusunan LKE PMPRB pada

Perangkat Daerah. Dalam persiapan ini tim RB melakukan koordinasi ke tim evaluator Kemenpan RB dalam rangka permintaan sebagai narasumber.

2. Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penyusunan LKE PMPRB pada Perangkat Daerah, yang dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 17 Februari 2022 sebagaimana Surat Sekretaris Daerah Nomor 890/0415/OR-C tanggal 8 Februari 2022 Hal Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penyusunan LKE PMPRB.
 3. Selanjutnya Tim RB Biro Organisasi juga melaksanakan fasilitasi konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan arahan terkait hasil pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat dipergunakan dalam evidence LKE PMPRB.
- ii. Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi / Internalisasi Road Map RB Pemprov Kalbar dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100 Orang.
- Pelaksanaan Sosialisasi / Internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2020 – 2024 merupakan salah satu bentuk pembinaan percepatan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memberikan arahan dan panduan pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan langkah-langkah percepatan reformasi birokrasi yang selaras dengan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional dan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- Berkenaan dengan hal tersebut, Biro Organisasi Setda Prov Kalbar telah melaksanakan Sosialisasi / Internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2020 – 2024 melalui langkah – langkah konkrit sebagai berikut :
1. Melaksanakan rapat internal tim RB Biro Organisasi;
 2. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 melalui internalisasi langsung ke Perangkat Daerah masing-masing. Dalam hal ini Tim RB Biro Organisasi berkunjung ke seluruh Perangkat Daerah secara langsung dalam menginternalisasikan road map reformasi birokrasi, rencana aksi RB Pemprov Kalbar, serta sekaligus memantau perkembangan pelaksanaan rencana kerja RB Perangkat Daerah.
 3. Melaksanakan pembinaan dan internalisasi intensif pada Perangkat Daerah dengan nilai Reformasi Birokrasi dibawah 60 sebagaimana surat Sekretaris Daerah Nomor 890/3501/RO-ORG. Dalam kegiatan ini tim RB Biro Organisasi memberikan pemahaman yang meliputi road map RB Pemprov Kalbar, Rencana Aksi RB, Langkah-langkah percepatan RB serta penyusunan evidence LKE PMPRB Unit.
- iii. Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dengan realisasi sebesar 346% dengan capaian kinerja 45 Perangkat Daerah/ Biro. Biro Organisasi Setda Prov Kalbar telah melaksanakan pembinaan penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Barat yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, serta Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2019 – 2023. Adapun langkah – langkah konkrit yang telah dilakukan terkait pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi dimaksud antara lain :

1. Rapat internal Tim Reformasi Birokrasi Biro Organisasi dalam rangka persiapan pembinaan penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Barat;
 2. Rapat Pokja Reformasi Birokrasi dengan mengundang instansi terkait yang menjadi Ketua Pokja masing-masing 8 area perubahan yang dilaksanakan beberapa kali yaitu:
 - Pada tanggal 31 Januari 2022 sebagaimana surat Sekretaris Daerah Nomor 890/0282/OR-C hal Rapat Pokja Reformasi Birokrasi.
 - Pada tanggal 12 September 2022 sebagaimana surat Sekda Nomor 890/3297/RO-ORG dalam rangka tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan RB dan SAKIP tahun 2022.
 - Pada tanggal 29 September 2022 sebagaimana surat Sekretaris Daerah Nomor 890/3501/RO-ORG dalam rangka tindak lanjut hasil evaluasi RB tahun 2022.
 3. Melaksanakan pembinaan melalui asistensi penyusunan rencana kerja reformasi birokrasi 8 area perubahan pada seluruh PD sebagaimana surat Sekretaris Daerah Nomor 890/1323/RO-ORG.
 4. Melaksanakan pembinaan melalui asistensi paparan implementasi reformasi birokrasi pada seluruh PD melalui zoom meeting dengan narasumber dari Kementerian PAN dan RB sebagaimana surat Sekretaris Daerah Nomor 890/2268/RO-ORG.
 5. Memfasilitasi pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan SAKIP tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB melalui zoom meeting. Dalam hal ini biro organisasi bekerjasama dengan biro umum setda Provinsi Kalbar.
 6. Melaksanakan rapat persiapan panel evaluasi RB dan SAKIP pada tanggal 10 November 2022 dengan mengundang instansi terkait sebagaimana surat Sekretaris Daerah Nomor 890/4239/RO-ORG.
- iv. Jumlah kab/kota yang di bina dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 5 Kabupaten/ Kota. Sehubungan dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran pada kegiatan pembinaan penerapan reformasi birokrasi Kab/Kota maka tidak ada dilaksanakan monitoring dan evaluasi tahun 2021. Namun demikian langkah – langkah pembinaan lainnya diupayakan terus dilaksanakan baik

melalui Zoom Meeting maupun inventarisasi data pelaksanaan RB. Adapun langkah – langkah yang telah dilakukan terkait pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kabupaten/Kota antara lain :

1. Rapat internal Tim RB Biro Organisasi yang dilaksanakan secara rutin dalam rangka persiapan pembinaan serta diskusi hasil pembinaan;
2. Pembinaan dilaksanakan secara langsung ke beberapa Kabupaten, yaitu :
 - a) Kota Singkawang pada bulan Januari 2022;
 - b) Kabupaten Ketapang, dan Kayong Utara pada bulan November 2022;
 - c) Kabupaten Bengkayang, Landak dan Mempawah pada bulan Desember 2022;

- 2) Subkegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja memiliki beberapa output kinerja sebagai berikut:
 - i. Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 1 Laporan.
 - ii. Output dari kegiatan Kompetisi Budaya Kerja ASN BerAKHLAK di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 adalah laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Kegiatan kompetisi merupakan upaya memacu semangat dan aktualisasi nilai dasar ASN berAKHLAK di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
 - iii. Output dari kegiatan Deklarasi ASN BerAKHLAK di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 adalah laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Kegiatan Deklarasi merupakan langkah awal dalam upaya sosialisasi dan internalisasi nilai dasar ASN BerAKHLAK di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
 - iv. Output dari kegiatan Coaching Clinic ASN BerAKHLAK di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 adalah laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Kegiatan Coaching Clinic merupakan upaya lanjutan nilai dasar ASN BerAKHLAK di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

1. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 - 2022 dan Target Akhir Jangka Menengah 2022

TABEL 3.13
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2020-2022 DAN TARGET 2022
SASARAN STRATEGIS 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET RENSTRA			Tingkat Kemajuan
			2020	2021	2022	2021	2022	2023	
3.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada perangkat Daerah Provinsi	Jumlah perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan reformasi Birokrasi	47 PD	47 PD	45 PD				
	Meningkatnya pelaksanaan	Persentase Perangkat		95%	100%	100%	100%	100%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET RENSTRA			Tingkat Kemajuan
			2020	2021	2022	2021	2022	2023	
	Reformasi Birokrasi pada perangkat Daerah Provinsi dan Kab/ Kota	Daerah Provinsi dan Kab/ Kota dengan nilai Reformasi Birokrasi 60 ke atas							

Pada tahun 2022, target Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/ Kota dengan nilai Reformasi Birokrasi 60 ke atas sebanyak 100% dengan capaian sebanyak 100%. Perkiraan untuk Target Tahun 2023 sampai tahun 2024 akan terealisasi sesuai dengan tahun 2022 dikarenakan indikator kinerja diatas sudah diproyeksi akan tercapai sesuai dengan target.

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan pembinaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, antara lain :

1. Keterbatasan waktu dan sumber daya dalam melaksanakan pembinaan RB ke seluruh Perangkat Daerah;
2. Tindak lanjut rekomendasi perbaikan reformasi birokrasi belum dilaksanakan secara optimal oleh seluruh PD, sehingga masih terdapat catatan-catatan perbaikan dari tim evaluator pusat.
3. Masih terdapat Perangkat Daerah yang belum mendokumentasikan pelaksanaan RB dilingkungan instansinya secara menyeluruh dan terupdate.

Ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan Sosialisasi / Internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2020 – 2024, antara lain :

1. Keterbatasan waktu dan sumber daya dalam melaksanakan Sosialisasi / Internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2020 – 2024;
2. Adanya pergeseran anggaran, sehingga pelaksanaan internalisasi road map dilakukan secara kunjungan langsung ke seluruh Perangkat Daerah.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Sebagai upaya percepatan reformasi birokrasi secara berkelanjutan, perlu memperhatikan dan mengambil langkah – langkah perbaikan berdasarkan rekomendasi perbaikan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN dan RB Tahun 2022. Selain itu, pembinaan, sosialisasi / internalisasi dan monev RB pada Perangkat Daerah juga perlu dilakukan secara intensif.

Sebagai bagian penting dari perubahan mind-set dan cultural-set, budaya kerja semestinya dapat lebih dimaknai secara mendalam oleh seluruh aparatur sipil negara sehingga upaya reformasi birokrasi dapat lebih optimal. Di masa mendatang, kegiatan - kegiatan yang mendukung upaya pengembangan budaya kerja yang positif tidak hanya terbatas pada adanya Peraturan Gubernur tapi lebih kepada upaya meningkatkan kualitas serta

kuantitas budaya kerja yang berimplikasi langsung pada meningkatnya kualitas aparatur sipil negara di Provinsi Kalimantan Barat.

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya kualitas laporan kinerja (LKj) Pemerintah Prov. Kalbar.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

TABEL 3.14
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022
SASARAN STRATEGIS 4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya kualitas laporan kinerja (LKj) Pemerintah Prov. Kalbar	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	12	10,76	89,67
Capaian Kinerja Sasaran 4					

Realisasi capaian kinerja Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja Tahun 2022 ditargetkan sebesar 12 dan realisasinya 10,76 dengan capaian kinerja 89,67.

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.15
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
4.	Meningkatnya kualitas laporan kinerja (LKj) Pemerintah Prov. Kalbar	Program Penataan Organisasi	285.670.000	267.446.200	93,62	89,67	N/A

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 93,62% dan realisasi capaian kinerja sebesar 89,67%, maka pada sasaran ini belum efisien dalam penggunaan sumber dayanya.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota ditunjang oleh program penataan organisasi yang meliputi kegiatan:

1. Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.

Kegiatan ini mempunyai output Persentase laporan kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu dengan realisasi 100%. Output kinerja kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja ditunjang oleh subkegiatan sebagai berikut:

- 1) Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja memiliki beberapa output kinerja sebagai berikut:

i. Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemprov yang disusun dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 1 Laporan. Laporan Kinerja yang disusun ini memiliki dua fungsi utama. Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Presiden, DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan kinerja ini juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Terhadap rekomendasi yang disampaikan Menpan dan RB atas evaluasi akuntabilitas kinerja yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB pada tahun 2021, telah dilakukan beberapa perbaikan antara lain :

1. Gubernur telah mengadakan evaluasi kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk memastikan kinerja dan indikator kinerja telah berorientasi kepada hasil serta memastikan keterpaduan perencanaan level provinsi terhadap perencanaan level PD.
2. melakukan pendampingan dan asistensi revisi rencana strategis (Renstra) PD yang disahkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis PD Tahun 2018-2023.
3. Memastikan kinerja yang telah disusun dalam dokumen perencanaan telah diselaraskan dengan IKU Gubernur dengan melakukan asistensi perbaikan Perjanjian Kinerja dan Proses Bisnis sesuai dengan perubahan Renstra PD dan Menetapkan SK Gubernur Nomor 809 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Pemprov Kalbar.
4. Meningkatkan pemahaman Kepala PD terhadap Akuntabilitas Kinerja melalui pelaksanaan asistensi penyusunan pohon kinerja melalui pelaksanaan workshop penyusunan pohon kinerja yang berdasarkan kerangka kerja logis dengan peserta seluruh Kepala PD pada tanggal 22 Maret 2022
5. Memastikan perbaikan pohon kinerja, crosscutting dan cascading kinerja PD telah disusun berdasarkan hasil workshop penyusunan pohon kinerja dengan melaksanakan asistensi Tindak Lanjut hasil workshop pada tanggal 21-22 Juni 2022 yang dilaksanakan oleh Bappeda Prov Kalbar.
6. Memastikan Perbaikan Pohon Kinerja, Crosscutting dan Cascading Kinerja menjadi bahan awal Penyusunan RPJMD Transisi (RPD) 2024-2026 yang akan mulai disusun pada M1 Bulan September 2022.
7. Pemprov Kalbar telah melakukan penyempurnaan aplikasi e-kinerja dengan penambahan fitur monitoring. Terkait e-activity, Pemprov kalbar sedang membuat aplikasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang mengacu pada Permenpan 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan kinerja pegawai ASN.

Diharapkan pada akhir tahun 2022 ini aplikasi SKP telah dapat diselesaikan dan pada tahun 2023 sudah dapat digunakan serta diintegrasikan dengan aplikasi e-activity.

8. Pelaksanaan fasilitasi dokumen jangka menengah dan tahunan secara berkala dengan memastikan penyusunan dokumen dimaksud berdasarkan pohon kinerja, crosscutting dan cascading kinerja yang logical framework.
 9. Peningkatan kapasitas pemahaman perencana kab/kota melalui pelaksanaan bimbingan teknis.
 10. Bekerja sama dengan Lembaga Non Pemerintah dalam meningkatkan peran Pemprov bagi peningkatan SAKIP Kab/ Kota.
 11. Melakukan pendampingan terhadap penyusunan laporan kinerja, penyusunan perjanjian kinerja kabupaten /kota.
 12. Pemprov Kalbar telah melakukan asistensi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada 23- 25 Februari 2022.
 13. Terkait evaluasi internal/evaluasi program, inspektorat, bappeda dan biro organisasi telah menyusun pedoman evaluasi internal sebagai panduan bagi seluruh perangkat daerah untuk melakukan evaluasi internal dilingkungan kerjanya masing masing.
 14. Dalam mempercepat proses internalisasi disetiap perangkat daerah, telah pula dilakukan sosialisasi kepada seluruh perangkat daerah dlm teknis evaluasi dan pengisian form evaluasi internal yg telah disediakan.
 15. Evaluasi internal yg dilaksanakan oleh perangkat daerah pada dasarnya merupakan self assesment dan selanjutnya kembali di verifikasi oleh inspektorat saat melakukan evaluasi AKIP perangkat daerah.
- ii. jumlah dokumen perjangkin pemprov kalbar dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 1 Dokumen. Indikator hasil dari kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini yaitu Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Pemprov. Kalbar yang ditetapkan dengan target 1 Dokumen dan capaian indikator tersebut sebesar 1 dokumen.
 - iii. Indikator hasil dari kegiatan asistensi ini yaitu Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Kinerja dengan baik dengan seluruh Perangkat Daerah dan Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja dengan baik dengan target seluruh PD.
 - iv. jumlah perangkat daerah yang di monitoring dan evaluasi dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 45 Perangkat Daerah/ Biro. Hasil daripada monitoring tersebut sudah disampaikan langsung oleh Kepala Biro Organisasi Seta Prov Kalbar Kepada Bpk. Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar pada Bulan November 2022, serta Update Inputan data aplikasi e-Kinerja terus dilakukan sampai akhir tahun 2022
 - v. jumlah perangkat daerah yang mengikuti workshop sakip dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 45 Perangkat Daerah/ Biro. Indikator output dari kegiatan ini yaitu

Jumlah Perangkat Daerah dan Biro yang mengikuti Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (*Workshop SAKIP*) dengan target 45 Perangkat Daerah dan capaian indikator tersebut sebesar 45 Perangkat Daerah.

1. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 - 2022 dan Target Akhir Jangka Menengah 2022

**TABEL 3.16
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2020-2022 DAN TARGET 2022
SASARAN STRATEGIS 4**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET RENSTRA			Tingkat Kemajuan
			2020	2021	2022	2021	2022	2023	
4.	Meningkatnya penyajian pelaporan kinerja (LKj) Pemerintah Prov. Kalbar	Komponen SAKIP nilai pelaporan kinerja	11						
	Meningkatnya kualitas laporan kinerja (LKj) Pemerintah Prov. Kalbar	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja		10,83	10,76	11,5	12	12,5	

Pada Tahun 2020, Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja terealisasi sebesar 11. Pada tahun 2021, Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja terealisasi sebesar 10,83. Pada tahun 2022, Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja sebesar 10,76. Perkiraan untuk Target Tahun 2023 sampai tahun 2024 akan terealisasi sesuai dengan tahun 2022. Namun ini masih bisa berubah apabila ada perubahan cara penghitungan nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja oleh Kementerian PAN dan RB RI.

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Selanjutnya sesuai substansi revidi di atas terdapat beberapa Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Laporan Kinerja tersebut di revisi oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan dan telah di upload di esakip revidi menpan.
2. Sedangkan untuk Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022, secara keseluruhan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan tetapi terdapat beberapa permasalahan pada masing-masing Perangkat Daerah yaitu diantaranya:
 - a. Indikator Kinerja yang terdapat di Perjanjian Kinerja masih ada yang belum sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah.
 - b. Dengan adanya Penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan ke Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 ke Kepemendagri Nomor 050-5889, maka mengakibatkan terjadinya perubahan Indikator Kinerja serta Program maupun Kegiatan pada Perangkat Daerah.

- c. Efek dari penyederhanaan birokrasi otomatis merubah perjanjian kinerja yang dahulu dari jabatan pengawas ke jabatan fungsional tentunya mengalami perubahan atau penyesuaian terhadap penyusunan perjangkinnya.

Berdasarkan capaian kinerja sasaran sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalbar Tahun 2018-2023, menunjukkan bahwa pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat mengalami kemajuan dan akan ditingkatkan secara optimal. Namun disisi lain masih terdapat beberapa sasaran yang telah ditetapkan dalam target perencanaan kinerja, tetapi belum tercapai secara optimal. Hal ini akan menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memperbaiki kinerjanya.

Berdasarkan monitoring yang dilaksanakan selama tahun 2022 terdapat beberapa permasalahan yang menyangkut teknis dan non teknis dalam rangka monitoring SAKIP menggunakan aplikasi e-kinerja. Secara teknis persoalan yang dialami adalah terkait dengan menu-menu aplikasi yang belum optimal dalam penyajian halaman. Demikian juga dengan Perangkat Daerah terkait, masih belum maksimal dalam melaksanakan integrasi data, yang semestinya data perencanaan sudah dapat dibaca oleh sistem monitoring melalui aplikasi e-kinerja namun antara sistem perencanaan dan sistem penilai belum dapat dibaca/fahami dengan baik. Untuk Perangkat Daerah sendiri masih banyak yang belum memaksimalkan pelaporan SAKIP berbasis aplikasi e-kinerja yang semestinya sangat memudahkan dalam hal penyajian data.

Sementara itu permasalahan non teknis adalah permasalahan yang terkait dengan Perangkat Daerah masing-masing, diantaranya : terkendala data dari bidang-bidang, pergantian pejabat struktural atau yang menangani sebelumnya dan banyak lagi.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ke depan telah dirumuskan beberapa langkah penting dan strategis sebagai upaya pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki SAKIP di Provinsi Kalimantan Barat. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi capaian kinerja ini akan dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan ditahun yang akan datang sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj.Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja organisasi yang dapat menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran;
2. Melakukan penajaman kembali strategi kebijakan pembangunan yang harus terjabarkan dalam program kerja perangkat daerah sehingga menjadi lebih fokus dan realistis dalam mencapai sasaran strategis yang telah di tetapkan dalam dokumen RPJMD 2018-2023;
3. Konsisten melakukan perbaikan dan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan pelabuhan dalam rangka membuka daerah-daerah terisolir, perbatasan dan daerah tertinggal serta mendukung peningkatan produktivitas di berbagai sector pembangunan termasuk

upaya peningkatan ekspor-impor dan investasi di Provinsi Kalimantan Barat;

4. Melanjutkan program-program pembangunan melalui kegiatan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan desa mandiri di Provinsi Kalbar, mengentaskan kemiskinan, ketimpangan dan menekan laju pengangguran;
5. Saling menjaga kerukunan antar umat beragama, etnis di wilayah Provinsi Kalimantan Barat guna mewujudkan situasi yang kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat;
6. Secara terus-menerus melakukan peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan, dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui peningkatan kualitas SDM Aparatur, manajemen pemerintahan, sistem AKIP dan Peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Solusi permasalahan yang berkaitan dengan monitoring Kinerja SAKIP dengan sistem manual maupun dengan sistem berbasis aplikasi adalah :

1. Untuk teknis : agar vendor dalam hal ini Diskominfo melakukan update sesuai kebutuhan User. Selain itu diharapkan kepada vendor agar dapat menginput data perencanaan dan selalu uptodate data.
2. Non teknis : kerjasama dalam penyajian data agar lebih diintensifkan lagi, supaya pada saat penginputan data sudah lengkap.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat telah dialokasi anggaran dalam APBD Tahun 2022 sebesar Rp.2.911.172.956,00. Anggaran ini merupakan angka setelah adanya perubahan anggaran yang terdiri atas anggaran program rutin/penunjang sebesar Rp.841.921.477,- dan anggaran program prioritas sebesar Rp.2.069.251.479,- sebagaimana yang terdapat dalam tabel yaitu:

TABEL 3.17
ALOKASI DAN REALISASI PROGRAM PRIORITAS

NO	PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
A.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	2.069.251.479,00	2.030.092.100,00	98,32
	JUMLAH	2.069.251.479,00	2.030.092.100,00	98,32

BAB IV PENUTUP

Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang disajikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2022, khususnya untuk 4 (empat) Sasaran, 2 (dua) Program dan 30 (tiga puluh) kegiatan pokok yang telah dilaksanakan secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat pencapaian kinerja mencapai **98,32%**.

Tingkat pencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kelembagaan provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sebesar 100%, yaitu pada *Program Penataan Organisasi (100%)*.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Kalbar sebesar 100%, yaitu pada *Program Penataan Organisasi (100.96%)*.
3. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota sebesar 100%, yaitu pada *Program Penataan Organisasi (100%)*.
4. Meningkatnya kualitas laporan kinerja (LKj) Pemerintah Prov. Kalbar sebesar 100%, yaitu pada *Program Penataan Organisasi (89,67%)*.

Secara umum, capaian kinerja yang dicapai tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja untuk 4 (empat) sasaran yang dilakukan pengukuran dapat dikategorikan berhasil dengan pencapaian kinerja sebesar 98,32%.
- b. Capaian kinerja untuk 1 (satu) program pokok yang dilakukan pengukuran dapat dikategorikan berhasil dengan pencapaian kinerja sebesar 98,32%.
- c. Capaian kinerja untuk 8 (delapan) kegiatan pokok yang dilakukan pengukuran dapat dikategorikan berhasil dengan pencapaian kinerja sebesar 98,32%.

Walaupun pencapaian kinerja dikatakan berhasil, namun masih ada beberapa hambatan didalam pencapaian sasaran, program dan kegiatan di atas, antara lain:

- a. Masih adanya revisi berbagai Peraturan Perundang-Undangan di bidang organisasi.
- b. Belum semua Perangkat Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang melaporkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat.
- c. Keterbatasan waktu dan sumber daya dalam melaksanakan pembinaan RB ke seluruh Perangkat Daerah.
- d. Laporan Kinerja telah disusun sampai ke level Perangkat Daerah, namun masih banyak mengungkapkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum sepenuhnya menggambarkan analisis pencapaian kinerjanya. Laporan kinerja juga belum mampu menampilkan efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja.
- e. Penetapan program dan kegiatan belum seluruhnya berfokus pada pencapaian sasaran sehingga masih terdapat program dan kegiatan yang kurang relevan menyebabkan tidak efisiensi dan efektif.

Hal-hal yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan atau kendala tersebut, antara lain:

- a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.
- b. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah agar segera membuat Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas dimaksud.
- c. Menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan SKM di daerah sehingga mengikat semua unit pelayanan dalam melaksanakan SKM.

- d. Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja organisasi yang dapat menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran;
- e. Meningkatkan kualitas pengukuran terhadap output dan outcome secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja sasaran organisasi.

Pontianak, 31 Januari 2023
KEPALA BIRO ORGANISASI


MEDYA YANUAR ABDULLAH, S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19700115 198903 1 001

